



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORITIS

### A. Kajian Teori tentang Riba

#### 1. Pengertian Riba

*Riba* (الربا) secara bahasa bermakna: *ziyadah* (زيادة) yang berarti “tambahan.”<sup>1</sup> Dalam istilah hukum Islam, riba adalah tambahan, baik berupa tunai, benda, maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan, kepada pihak yang meminjamkan, pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.<sup>2</sup>

Arti riba seperti pada ayat:



Artinya:

.... kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (QS. Al-Hajj [22]: 5).

Dalam pengertian lain, riba juga berarti “tumbuhan” dan “membesar.”

Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama masa periode tertentu.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhadzdzab fi al-Fiqh al-Imâm al-Syafi’î*, (Beirut: Darul al-Kitab al-‘Alamiyah, 1408 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 633.

<sup>2</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 11.

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah; Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Ensiklopedi Indonesia ada disebutkan bahwa riba menurut syari'ah adalah setiap peminjaman uang yang menghasilkan bunga berlipat ganda. Makan riba artinya memungut bunga uang yang berlebih-lebihan.<sup>4</sup>

Mengenai hal ini Allah Swt memperingatkan dalam firman-Nya:



Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil. (QS. Al-Nisa' [4]: 29).*

Dalam kaitannya dengan pengertian "*al-bathil*" dalam ayat di atas, Ibnu al-'Arabi al-Maliki, dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an* menjelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah "tambahan," namun yang dimaksud riba dalam al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariat.<sup>5</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit atau banyak.<sup>6</sup> Demikian juga yang dikatakan Imam Sarakhsi dalam kitab *al-Mabsuth*, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya '*iwadh*' yang dibenarkan syari'at atas penambahan tersebut.<sup>7</sup>

Menurut istilah, ulama Hanabilah mengatakan bahwa bunga (riba) itu dikhususkan pada tambahan konsumtif. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah,

<sup>4</sup> Syahirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), hal. 46.

<sup>5</sup> Ibnu al-'Arabi al-Maliki, *A kârn al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1409 H/ 1989 M), hal. 320.

<sup>6</sup> Sayid Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Thiba'ah wa al-Nasri wa al-Tauzi', 1408 H/ 1988 M), juz. 3, hal. 103.

<sup>7</sup> Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409 H/ 1989M), juz. 13, hal. 109.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bunga (riba) produktif yaitu pada jual-beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang sejenis misal, emas dengan emas.<sup>8</sup>

Menurut Ibn al-‘Arabi dalam bukunya “*A kâim al-Qur’ân*” menyebutkan definisi riba adalah setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai barang yang diterimana. Jika dibuat lebih sederhana, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>9</sup> Senada dengan Ibn al-‘Arabi, Yusuf al-Qardawi, mengatakan bahwa setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah riba.<sup>10</sup>

Terdapat perbedaan dalam mengartikan arti kata “riba.” Tetapi perbedaan itu lebih dipengaruhi oleh penafsiran mereka yang dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan dalam pemberi definisi, namun substansi dari definisi tersebut sama. Secara umum ekonom Muslim dapat menarik benang merah tersebut dan menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli, maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah; Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 37.

<sup>9</sup> Abu Bakar bin al-‘Arabi, *A kâim al-Qur’ân*, *Op. Cit.*, juz. 2, hal. 217.

<sup>10</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fawâ'id al-Bunûk Hiyâ al-Ribâ Harâm*, (Kairo: Dar al-Furqan li al-Nâsr wa al-Tauzi’, 1422 H/ 2001 M), hal. 41.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 37-38.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Hukum dan Dalil tentang Riba

Dasar persoalan riba dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam empat tempat, yaitu:

a. Surat al-Rum ayat 39:



Artinya:

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Al-Rum [30]: 39).*

b. Surat al-Nisa' ayat 161:



Artinya:

*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. Al-Nisa' [5]: 161).*

c. Surat Ali Imran ayat 130-132:





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. (QS. Ali Imran [3]: 130-132)*

[illegible]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 275-280).*

Tahap pembicaraan riba sama dengan tahap pembicaraan tentang *khamr* (minuman keras), yang pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (al-Rum ayat 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (al-Nisa' ayat 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit, dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (ali-Imran ayat 130), dan pada tahap terakhir diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (al-Baqarah ayat 278).<sup>12</sup> Sedangkan menurut Sayyid

<sup>12</sup> Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1408 H/ 1988 M), juz. 1, hal. 389.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasyid Ridha mengatakan bahwa haramnya riba itu semenjak turunnya surat ali-Imran ayat 130.<sup>13</sup>

Ayat di atas merupakan kecaman keras pemungutan riba, dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan setan. Ayat ini juga membantah kesamaan antara riba dan jual beli dengan menegaskan bahwa Allah Swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan ini juga dipertegas dalam ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba dan dipertegas kembali pada ayat 279.

Mengapa Allah mengcam keras praktik riba dan kemudian mengharamkannya? Ayat 276 surat al-Baqarah memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni “Allah Swt bermaksud menghapus tradisi riba dan menumbuhkan tradisi sedekah.”<sup>14</sup> Adapun ‘*illat*’ pengharaman riba dinyatakan dalam ayat 279 dari surat surat al-Baqarah, yaitu *وَلَا تَظْلِمُوا وَلَا تَظْلَمُوا*. Maksudnya adalah dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat *dzulm* (menganiaya) kepada pihak lain, sehingga tidak seorangpun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasanya ‘*illat*’ pengharaman riba dalam surat al-Baqarah adalah *zhulm* (eksploitasi; menindas, memeras dan menganiaya).

Di antara dalil dari hadis Nabi yang menunjukkan akan haramnya riba adalah hadis berikut:

<sup>13</sup> Sayyid Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1408 H/ 1988 M), juz. 4, hal.123.

<sup>14</sup> Sedekah adalah suatu pemberian yang bertujuan memelihara kebaikan dan kesucian, didasarkan atas rasa *takaful* (penuh kebersamaan) dan *ta’awun* (saling tolong menolong).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً سَوَاءً وَأَمَرْنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا. (رواه البخاري)<sup>15</sup>

Artinya:

Rasulullah Saw melarang menjual perak dengan perak, kecuali sama beratnya emas dengan emas dan membolehkan kita menjual emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai kehendak kita. (HR. Bukhari).

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالنَّوَثِيُّ يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. (رواه البخاري).<sup>16</sup>

Artinya:

Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina.” (HR. Bukhari).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوزنٍ مِثْلًا مِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوزنٍ مِثْلًا مِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَاً. (رواه مسلم)<sup>17</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah Saw bersabda: “Emas dengan emas harus sama dan sebanding, perak dengan perak harus sama dan sebanding. Barangsiapa melebihi atau menambah, maka dia telah melakukan praktik riba. (HR. Muslim).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم)<sup>18</sup>

Artinya:

Dari Jabir dia berkata: “Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama.” (HR. Muslim).

<sup>15</sup> Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 202.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 203.

<sup>17</sup> Abi al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih al-Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal.1.212.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 1.213.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً.<sup>19</sup>

Artinya:

Rasulullah Saw bersabda: “Satu Dirham hasil riba yang dimakan seseorang, sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina.” (HR. Ahmad).

Hadis-hadis di atas memberikan gambaran bahwa riba merupakan persoalan penting yang wajib dihindari oleh umat Islam karena termasuk dosa besar, dan bagi para pelakunya mendapat laknat. Oleh karena itu Nabi Saw memerintahkan untuk mengambil yang halal dan jelas, serta meninggalkan yang *syubhat*, apalagi yang jelas keharamannya sebagaimana hadis Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ الْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مِثْبَهِاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ أَتَقَى الْمِثْبَهِاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ كَرَعَ يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحْرَمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (رواه البخاري).<sup>20</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Zakaria dari ‘Amir berkata: “Aku mendengar Nu’man bin Basyir berkata”: “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara *syubhat* (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang *syubhat* berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara *syubhat*, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik, maka baiklah tubuh

<sup>19</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 2, hal. 123.

<sup>20</sup> Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, *Op. Cit.*, juz. 2, hal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*tersebut, dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati.”* (HR. Bukhari).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa riba itu haram, termasuk salah satu dosa besar yang wajib di jauhi oleh umat Islam agar tidak mendapatkan laknat Allah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai status hukum keharaman riba. Perbedaan pendapat muncul saat para ahli ilmu menentukan apakah bunga bank konvensional yang telah menjadi sistem perekonomian dunia adalah sama dengan riba atau tidak.

Abu Zahrah dalam kitab *Buhuts fi al-Riba* menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi. Artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.<sup>21</sup>

### 3. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu riba yang terjadi akibat hutang-piutang dan riba yang terjadi akibat jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Adapun kelompok yang kedua, riba jual-beli menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Buhutsu fi al-Riba*, (Beirut: Dar al-Buhuts al-Ilmiyyah, 1399 H/1980 M), hal. 38-39.

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik, Op. Cit*, hal. 41.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara jumbuh ulama, membagi riba dalam dua bagian, yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*

#### 3.1. Riba *Qardh* (pinjaman)

Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Dalam arti lain, bahwa beban bunga (tambahan) dibebankan kepada yang berhutang, yang di dalamnya ada unsur eksploitasi. Riba *qardh* atau bunga atas pinjaman, membebaskan atas pinjaman karena berlalunya waktu (pinjaman berbunga) dan hal ini sering kali disebut sebagai riba *nasi'ah* (bunga karena menunggu).<sup>23</sup>

#### 3.2. Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Riba jahiliyah dilarang karena kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

Artinya:

Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba.

Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba *jahiliyah* tergolong riba *nasiah*, namun dari segi kesamaan obyek yang dipertukarkan tergolong riba *fadhl*.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 42.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 43-44. Riba pada masyarakat jahiliyah terjadi ketika si pemilik menagih kepada si peminjam hutangnya pada saat jatuh tempo. Jika si peminjam sanggup, uang yang dipinjamnya semula akan dikembalikan dan hutang tersebut dianggap lunas. Tetapi apabila si peminjam tidak sanggup membayar, maka tenggang waktu akan diberikan kepadanya dengan syarat ia bersedia membayar sejumlah tambahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Qatadah, bahwa riba *jahiliyah* adalah bila seseorang berhutang, karena tidak sanggup membayar pada masa yang disepakati, ia dikenakan tambahan atas hutang pokok untuk pelunasan berikutnya.<sup>25</sup> Selain itu, riba ini kadang berpangkal pada pemanfaatan ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap jenis-jenis barang tertentu dan kadang pada pemanfaatan kebutuhan mereka terhadap satu jenis tertentu.

### 3.3. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* (tunai) disebut juga riba *buyu'* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama jenisnya (بمثل مثلاً), sama kualitasnya (بسواء سواء) dan sama waktu penyerahannya (ببداً). Jenis riba ini diharamkan karena penyebab atau pembawa kepada riba *nasi'ah*.<sup>26</sup>

Abu Said al-Khudri meriwayatkan, bahwa Nabi Saw, bersabda:

...وَلَا تَبِيعُوا الدَّرْهَمَ بِالدَّرْهَمَيْنِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا.<sup>27</sup>

Artinya:

Janganlah kamu menjual satu Dirham dengan dua Dirham, sesungguhnya aku menakuti kamu berbuat riba. (HR. Tirmidzi).

Dengan demikian pelarangan riba *fadhl* karena beliau takut kalau mereka berbuat riba *nasi'ah*. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan riba *fadhl* dengan “Penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam

<sup>25</sup> Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1407 H/ 1987 M), juz. 4, hal. 101.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 46.

<sup>27</sup> Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 1406 H/ 1986 M), juz. 2, hal. 204.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.<sup>28</sup>

Bentuk riba yang berkaitan dengan jual-beli, yakni kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang sejenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, ada hadis yang menerangkan tentang riba *fadh*l yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا  
الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْتَوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ  
بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْتَوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا  
بِنَاجِزٍ. (رواه مسلم)<sup>29</sup>

Artinya:

Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo. (HR. Muslim).

Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.

#### 3.4. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), juz. 4, hal. 483.

<sup>29</sup> Abi al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih al-Muslim*, *Op. Cit.*, juz. 2, hal. 930.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riba *nasi'ah* terjadi karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Riba *nasi'ah* juga disebut dengan riba *buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria untung rugi muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*).<sup>30</sup> Ibn Abbas, Usamah ibn Jaid ibn Arqam, Jubair ibn Jabir, dan lain-lain berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba *nasi'ah*. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِئَةِ.<sup>31</sup>

Artinya:

Tidak ada riba kecuali riba *nasi'ah*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Ulama lainnya menentang pendapat tersebut dan memberikan dalil-dalil yang menetapkan riba *fadh*l, sedangkan *tabi'in* sepakat tentang haramnya kedua riba tersebut.<sup>32</sup>

Imam Malik mengatakan bahwa ada kesepakatan bulat di antara ahli fiqih menyangkut semua larangan transaksi kredit, di mana seseorang memberikan pinjaman, tetapi peminjam mengembalikannya (atau berjanji untuk mengembalikan) sebelum jangka waktu yang telah ditentukan habis. Apabila pemberi pinjaman mengurangi jumlah pengembalian, atau

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, Op. Cit, hal. 47. Riba *nasi'ah* sering disebut juga dengan riba *jahiliyah*, karena biasa dilakukan orang pada zaman *jahiliyah* dan sering disebut dengan riba *qardh*, lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), hal. 27.

<sup>31</sup> Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Op. Cit, juz. 2, hal. 209. Lihat juga Abi al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih al-Muslim*, Op. Cit, juz. 2, hal. 939.

<sup>32</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, Op. Cit, hal. 58.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila peminjam memperpanjang masa hutangnya melebihi jangka waktu yang telah disepakati, maka peminjam berjanji akan menambahkan jumlah hutangnya melebihi hutang yang diterimanya, yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan pemberi pinjaman. Menurut Imam Malik, hak itu merupakan bunga dan tidak ada keraguan terhadapnya masalah tersebut. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.<sup>33</sup>

#### 4. Hikmah Pengharaman Riba

Islam dalam membahas persoalan haram riba semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlakunya, masyarakatnya maupun perekonomiannya. Adapun hikmah diharamkannya riba, di antaranya sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain tanpa mengganti. Sebab orang yang meminjamkan uang 1 Dirham dengan 2 Dirham misalnya, maka dia dapat tambahan satu Dirham tanpa imbalan ganti. Sedangkan harta orang lain itu merupakan standar hidup dan mempunyai kehormatan yang sangat besar, seperti apa yang disebut dalam hadis Nabi:

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 60-61. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi *al-ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya resiko (*al-ghurmi*). Hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*), *al-ghunmu* dan *kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi.

<sup>34</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: Maktabah al-Islami, 1409 H/ 1989 M), hal. 231-233.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

حَرَمَةُ مَالِ الْإِنْسَانِ كَحَرَمَةِ دَمِهِ.<sup>35</sup>

Artinya:

*Bahwa kehormatan harta manusia, sama dengan kehormatan darahnya.* (HR. Tirmidzi).

Oleh karena itu, mengambil harta orang lain tanpa ganti sudah pasti haramnya.

- b. Riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja. Sebab kalau si pemilik uang yakin, bahwa dengan melalui riba dia akan memperoleh tambahan uang, baik kontan ataupun berjangka, maka dia akan mempermudah persoalan mencari penghidupan, sehingga dia tidak mau menanggung beratnya usaha, dagang dan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Sedang hal semacam itu akan berakibat terputusnya bahan keperluan masyarakat. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kemaslahatan dunia seratus persen ditentukan oleh jalannya perdagangan, pekerjaan, perusahaan dan pembangunan.
- c. Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (*ma'ruf*) antara sesama manusia dalam bidang pinjam-meminjam. Sebab kalau riba itu diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan uang satu Dirham dan dengan tambahan satu Dirham juga. Tetapi apabila riba itu dihalalkan, maka seseorang akan menganggap berat dengan meminjam uang satu dirham dengan mengembalikan dua dirham. maka hal tersebut akan menyebabkan terputusnya kasih sayang di antara umat Islam.

<sup>35</sup> Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Op. Cit, juz. 2, hal. 207.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pada umumnya pemberi piutang adalah orang yang kaya, sedang peminjam adalah orang yang tidak mampu. Maka pendapat yang membolehkan riba, berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan.

## B. Kajian Teori tentang Bunga Bank

### 1. Pengertian Bunga Bank

Bank adalah suatu lembaga bisnis, sedangkan bunga adalah suatu mekanisme bank dalam pengelolaan peredaran dana masyarakat. Anggota masyarakat yang memiliki dana, dapat atau bahkan dihibau untuk menitipkan dana mereka yang tidak digunakan pada bank untuk jangka waktu tertentu. Kemudian bank meminjamkan dana itu kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan dana untuk usaha dalam jangka waktu tertentu pula. Anggota masyarakat yang meminjam dana dari bank pada umumnya untuk dipergunakan sebagai modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, dan dia akan mendapat keuntungan dari usahanya yang dimodali oleh bank tersebut.<sup>36</sup>

Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga itu timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah “kapital” atau “modal” berupa uang. Bunga itu juga dapat disebut dengan istilah “rente” atau “interest”.<sup>37</sup> Menurut Goedhart bunga atau rente itu adalah perbedaan nilai,

<sup>36</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan, Op. Cit*, hal. 14.

<sup>37</sup> Syahirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), hal. 18.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergantung pada perbedaan waktu yang berdasarkan atas perhitungan ekonomi.<sup>38</sup>

Persoalan halal tidaknya bunga (*interest*) sebagai instrumen keuangan merupakan sumber kontroversi di seluruh dunia Islam sejak lama. Sumber kontroversi ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang melarang riba sebuah praktik Arab kuno, yakni apabila seseorang berhutang, maka hutangnya akan berlipat jika ia menunggak lagi. Selama berabad-abad, banyak kaum Muslimin yang menyimpulkan bahwa ayat-ayat mengenai kontrak pinjaman yang menetapkan keuntungan tertentu bagi si pemberi pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah atau haram, terlepas dari tujuan, jumlah pinjaman, maupun lembaga yang terlibat.<sup>39</sup>

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.<sup>40</sup> Bunga juga dapat diartikan sebagai harga<sup>41</sup> kepada deposan (yang memiliki simpanan) dan kreditur (nasabah yang memperoleh pinjaman) yang harus dibayar kepada bank.

Institusi bunga bank yang dalam hal ini adalah bunga yang bukan termasuk riba, atau dapat dikatakan dengan bagi hasil menurut syariat Islam (perbankan syariah) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negara lain (non

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 19.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>40</sup> Komaruddin, *Kamus Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 80.

<sup>41</sup> Menurut Ibnu Khaldun, harga merupakan nilai atau patokan suatu barang yang mendatangkan suatu keuntungan dari berbagai bidang, lihat Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun* Terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal. 473.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslim). Bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu sebagai kejahatan yang menyebabkan kesengsaraan dalam kehidupan.<sup>42</sup>

Al-Qur'ân mengakui bahwa meminum-minuman keras itu bukan tidak ada manfaatnya sama sekali, tetapi Islam mengharamkannya karena akibat-akibat buruk yang diakibatkan oleh minuman-minuman keras itu jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Kita mengakui bahwa dalam pelaksanaan sistem bunga dalam bank itu tidak selalu baik, dan dapat mencelakakan nasabah yang meminjam uang dari bank, tetapi jumlah yang merasa tertolong oleh sistem bunga yang diperlakukan oleh bank-bank konvensional itu jauh lebih banyak dari pada mereka yang dirugikan. Maka analogi dengan hukum minum-minuman keras, sistem bunga dalam bank konvensional itu tidak haram.<sup>43</sup>

Dalam literatur ulama fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan yang mengkaitkan antara riba dan bunga perbankan, sebab lembaga perbankan seperti yang berkembang sekarang ini tidak dijumpai dalam zaman mereka. Bahasan bunga bank apakah termasuk riba atau tidak, baru ditemukan dalam berbagai literatur fiqh kontemporer.

## 2. Sejarah Bunga Bank

Bangsa-bangsa dahulu telah mengenal bank, tetapi bank ini berbeda dengan bank modern, sesuai dengan awal tingkat terjadinya transaksi di waktu itu. Saat itu belum ada mata uang, dan baru muncul pada abad pertengahan,

<sup>42</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana BhaktiPrima Yasa, 2002), juz. 3, hal. 76.

<sup>43</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan, Op. Cit*, hal. 65.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka timbullah lembaga perbankan yang mereka gunakan sebagai alat mata uang, penukaran uang dengan yang lain, dan penyimpanan.<sup>44</sup>

Hal ini sesuai dengan tingkat kemajuan yang mereka capai pada saat itu. Mereka belum mengoperasikan uang yang didepositokan pada para bankir. Kemudian para bankir berpendapat bahwa lebih baik kalau uang tersebut sebagian mereka kelola, karena pada umumnya pemilik uang tidak menginginkan uang yang mereka titipkan itu dioperasikan, sehingga dengan uang yang dititipkan itu mereka dapat mengoperasikannya dalam jumlah tertentu, seraya mereka pun dapat mengembalikan uang titipan ini pada saat penitipnya memintanya kembali.<sup>45</sup>

Dengan cara semacam ini, penitip (deposan) tidak mengetahui bahwa uangnya telah dioperasikan atau dikembangkan oleh si bankir, karena yang bersangkutan dapat mengembalikan kepada pemiliknya kapan saja uang itu ditariknya kembali, karena uang yang dititipkan pada si bankir itu banyak, sehingga ia dapat memperbesar operasinya dan mendatangkan keuntungan yang besar pula.<sup>46</sup>

Dengan demikian, si bankir berpendapat bahwa suatu hal yang menguntungkan bagi dirinya kalau penitip uang (deposan) diberi bagian dari keuntungan uang yang mereka titipkan kepadanya, sehingga uang mereka pun berkembang pula. Dengan cara ini, si penitip memperoleh keuntungan dan si bankir juga mendapat untung yang jauh lebih besar. Jika si deposan tidak diberi

<sup>44</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Terj. M. Tholib, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), hal. 95.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 96.

<sup>46</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Terj. M. Tholib, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), hal. 95.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan, barang kali mereka tidak akan menitipkan uangnya lagi pada si bankir atau tidak mengizinkan untuk dikembangkan. Karena itu, akhirnya dapat digalakkan penitipan uang kepadanya, sehingga akan bertambah investasi dan keuntungannya. Dari sinilah kemudian lahir gagasan lembaga perbankan modern (bank konvensional). Yang menjadi sandaran paling besar bagi kelangsungan hidup perbankan adalah deposito, sekalipun bersandar juga pada dua sumber lain yaitu:

1. Modal, meliputi modal yang diberikan pemegang saham dan modal yang didapat dari keuntungan.
2. Kredit, hal ini dilakukan oleh bank-bank dagang bila membutuhkan modal, dan dipinjam dari bank sentral atau bank lain.<sup>47</sup>

Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal kurang lebih 2.500 tahun SM dalam masyarakat Mesir purba dan Yunani kuno, kemudian masyarakat Romawi. Karena itu, sepantasnya kalau Plato (427-347 SM) sudah berbicara tentang bahaya rente. Perkembangan bank modern mulai berkembang di Itali dalam abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk pembiayaan kepausan dan perdagangan wol, kemudian perbankan berkembang pesat sesudah memasuki abad ke-18 dan 19.<sup>48</sup>

Bank diambil dari kata *banco*, Bahasa Italia, artinya meja. Dulu para penukar uang (*money changer*) melakukan pekerjaan mereka dipelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi, para pengembara, dan wiraswastawan turun-naik kapal. *Money changer* itu meletakkan uang di atas

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 96.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 98.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah meja (*banco*) di hadapan mereka. Aktivitas di atas *banco* inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata “*banco*” dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini dengan nama “bank”. Dengan demikian, bank di sini berfungsi sebagai penukaran uang antar bangsa yang berbeda-beda mata uangnya.<sup>49</sup>

Secara kultural, tiap peradaban manusia sebenarnya menolak keberadaan bunga bank. Apabila dengan legitimasi ajaran agama, penolakan pun semakin kuat. Akan tetapi, kepentingan pragmatis ekonomi kapitalis meluluhlantahkannya. Para ulama fiqih mulai membicarakan tentang bunga bank (*riba*), ketika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak ayat-ayat al-Qur’ân yang membicarakan *riba* sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum *riba*. *Riba* dalam agama-agama langit (*samawi*) telah dinyatakan haram, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: (seperti yang dikutip Muhammad) “*Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang.*” Namun orang Yahudi beranggapan bahwa *riba* itu hanya terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi, tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. Hal ini sebagaimana terdapat dalam kitab Ulangan ayat 20 pasal 23.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> M. Zuhri, *Riba dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan; Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 142-143.

<sup>50</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 144.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kapan sebenarnya manusia mulai mempraktikkan riba? Tidak ada catatan pasti tentang ini. Yang jelas, pada masa Nabi Musa As, orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan bunga. Larangan ini, terdapat di *Old Testament* (Perjanjian Lama) dan UU Talmud seperti yang dikutip oleh Dwi Hardianto. Di antaranya, kitab *Deuteronomy* (Ulangan) pasal 23 ayat 19: *"Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat di bungakan"*.<sup>51</sup>

Larangan serupa juga tercantum di kitab *Exodus* (Keluaran) pasal 22 ayat 25 dan *Leviticus* (Imamat) pasal 35 ayat 7. Ini menunjukkan bahwa sebelum turunnya larangan ini, manusia telah mempraktikkan riba. Apalagi dalam al-Qur'ân surat al-Nisa' ayat 160-161 ditegaskan bahwa Allah akan memberikan azab yang keras kepada orang-orang Yahudi yang memakan riba. Jadi sebelum dan hingga masa Nabi Musa As, manusia telah mempraktikkan riba.<sup>52</sup>

Pada masa Yunani (abad VI SM-I M), terdapat beberapa jenis bunga yang besarnya dikategorikan menurut kegunaannya. Untuk pinjaman biasa antara 6-18%, pinjaman properti 6-12%, pinjaman antar kota 7-12%, sedang pinjaman perdagangan dan industri 12-18%. Tapi praktik ini dicela oleh dua ahli filsafat, Plato dan Aristoteles. Plato beralasan, penerapan bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Selain itu lanjut Plato, bunga merupakan alat kelompok kaya untuk mengeksploitasi masyarakat miskin. Sedangkan Aristoteles menyatakan bahwa uang adalah alat

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 145-146.

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 146.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tukar, bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga, sehingga pengambilan bunga secara tetap merupakan ketidakadilan.<sup>53</sup>

Meski dikecam, praktik riba kian tumbuh subur, terutama pada masa Romawi (Abad V SM-IV M). Bahkan saat Unciaria (342 SM) berkuasa di Byzantium, praktik bunga justru dilegalkan dengan UU. Dalam UU itu, masyarakat boleh mengambil bunga selama tingkat bunganya sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan UU (*maximum legal rate*). Meski begitu, pengambilannya tidak boleh dengan cara bunga-berbunga (*double countable*). Bunga yang dikenal saat itu adalah bunga maksimal 8-12%. Bunga pinjaman biasa di Roma dan pinjaman khusus Byzantium 4-12%, sedangkan bunga untuk daerah taklukan mencapai 6-100%.<sup>54</sup>

Ibnu Abi Zaid (w. 136 H 754 M) mengungkapkan bahwa praktik riba juga melanda bangsa Arab pra Islam, di mana riba dilakukan dengan berlipat ganda, baik terhadap uang maupun berbagai macam komoditi, serta perbedaan umur berlaku bagi binatang ternak. Apabila sudah mencapai jatuh tempo, pihak piutang (kreditur) akan menanyakan kepada pihak yang berhutang (debitur), apakah anda akan melunasi sekarang atau menambah pembayaran jumlah hutang yang anda pinjam? Jika pihak debitur mempunyai sesuatu, maka ia akan membayarkannya, tetapi jika hutangnya berupa binatang ternak, maka umurnya dapat meningkat (pada waktu pembayarannya). Apabila hutangnya berupa uang atau jenis komoditi lain, maka ia dapat meningkatkan dengan berlipat ganda pada waktu pengambilannya dalam jangka setiap tahun. Bila debitur

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 146-147.

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 148.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tidak dapat membayarnya, maka hutang tersebut dapat berlipat lagi, misalnya hutang 100 dalam satu tahun dapat meningkat menjadi 200. Jika tidak dibayar pada tahun berikutnya, maka hutang akan meningkat lagi secara berlipat ganda menjadi 400. Jelasnya, keterlambatan hutang akan bertambah berlipat ganda setiap tahunnya.<sup>55</sup>

Sementara, di belahan dunia lain, pada rentang waktu yang hampir bersamaan, di saat Gereja masih mengharamkan riba (abad I-XII M), ternyata telah berkembang dengan pesat praktik perekonomian tanpa riba. Praktik ini, dimulai setahap demi setahap seiring keberhasilan dakwah Rasulullah Saw, hingga bersebarunya agama Islam pertama di Madinah (sekitar tahun 3 H). Pelarangan total terhadap riba ini pun tercantum dengan tegas dalam QS. Al-Rum ayat 39, al-Nisa' ayat 160-161, Ali Imran ayat 130, al-Baqarah ayat 278-279 dan hadis-hadis Nabi sendiri. Sepeninggal Rasulullah Saw, seiring meluasnya pengaruh dan kekuasaan Islam hingga 2/3 dunia, perekonomian dan perdagangan di negeri-negeri Islam pun kian pesat berkembang. Di masa itu bermunculan ekonom-ekonom Muslim yang tetap konsisten memandang riba itu haram dan keji. Misalnya, Abu Yusuf (w. 182 H/ 798 M) dengan kitabnya *al-Kharraj* yang membahas keuangan publik dan akuntansi syariah. Kemudian, al-Ghazali (451-505 H/ 1055-1110 M) dengan kitabnya *Ihya' Ulum al-Din*, Ibnu Taimiyah (661-728 H/ 1263-1328 M) dengan kitabnya *al-Hisbah* tentang konsep harga yang adil, hingga Syah Waliyullah al-Dahlawi (1114-1176 H/ 1703-1762 M) dengan kitabnya *Hujjatullah al-Balighah* tentang rasionalisasi

<sup>55</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis alas Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), hal. 38.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan. Tetapi, prinsip keadilan dan kebersamaan yang dibangun oleh sistem ekonomi Islam, akhirnya harus tersingkir dari peta perkembangan ekonomi dunia yang kian kapitalistik dan pragmatis. Melunturnya praktik ekonomi tanpa riba di sebagian besar negeri Muslim berjalan berkelindan dengan menurunnya pamor dan kekuasaan negeri-negeri Muslim di belahan dunia mana pun. Puncaknya terjadi pada 4 November 1992, ketika Daulah Usmaniyah Turki sebagai pemegang amanah kekhalifahan harus rela melepas kekuasaannya, setelah berkuasa selama 633 tahun di Asia, Eropa, dan Afrika.<sup>56</sup>

Seiring perjalanan waktu, kekejian sistem riba secara ekonomi maupun sosial, mulai terkuak ke permukaan. Publik pun mulai melirik kembali sistem ekonomi tanpa riba yang pernah dicampakkannya. Akhirnya, dunia Islam pun merespon ramai-ramai keinginan umat untuk kembali hidup tanpa riba. Di penghujung tahun 1970-an, beberapa negara Islam mulai mengembangkan industri keuangan tanpa riba. Apabila setelah berdiri bank pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB), sebagai hasil dari sidang OKI di Karachi, Pakistan, Desember 1970.<sup>57</sup>

Pada akhirnya, ulama pun terlibat aktif untuk mendukung kembalinya sistem tanpa riba ini. Jika kemudian ulama-ulama sedunia mengeluarkan fatwa yang pada intinya menegaskan kembali bahwa bunga (riba) apapun bentuknya tetap haram, sedikit atau banyak. Di antara fatwa itu adalah:<sup>58</sup>

- a. Fatwa dari pertemuan OKI di Karachi, tahun 1970.

<sup>56</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Op. Cit, hal. 146.

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 147-148.

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 151.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Fatwa Kantor Mufti Negara Mesir tahun 1989 hingga 1900 yang memutuskan bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang di haramkan.
- c. Konferensi II Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) di Universitas Al-Azhar Kairo, Muharram 1385 H/ Mei 1965 menetapkan, tidak ada keraguan sedikit pun atas keharaman praktik membungakan uang seperti dilakukan oleh bank-bank konvensional.
- d. Fatwa lembaga Fiqih Rabitah Alam Islami Makkah dan konferensi Islam internasional di Jedah, tahun 1976.

### 3. Jenis-jenis Bunga yang Diberikan Kepada Nasabah

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari, ada dua jenis bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu:

#### 3.1. Bunga Simpanan (*Funding*)

Bunga simpanan atau *funding* adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya.<sup>59</sup> Sebagai contoh, jasa giro (*Demand Deposit*),<sup>60</sup> bunga tabungan (*Saving Deposit*),<sup>61</sup> bunga deposito (*Time Deposit*)<sup>62</sup> dan rekening koran (*Current Account*).<sup>63</sup>

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 158.

<sup>60</sup> Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahan buku.

<sup>61</sup> Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam bunga simpanan ini, apakah boleh untuk diambil keuntungannya (diterima) atau tidak, dan apakah bunga simpanan ini termasuk riba yang diharamkan? Dari sini, maka penulis akan mengutarakan berbagai pendapat dari kalangan ulama yang sebagian membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan dengan berbagai argumen yang mereka utarakan.

Menurut Mahmud Syaltut, mantan Rektor al-Azhar, Mesir dalam bukunya *al-Fatawa*, mengatakan bahwa keuntungan dari *postpaar bank* (Tabungan Pos) dan menganggap hukum penabungan itu adalah halal. Dasar bolehnya adalah karena ia tidak berupa pinjam meminjam antara si penabung dengan *postpaarbank* itu. Yang terjadi adalah bahwa pihak penabung yang datang ke tabungan pos secara sukarela, berharap agar uangnya diterima lembaga pos. Ia mengetahui bahwa lembaga akan menggunakan uang itu dalam proyek bisnis yang kecil kemungkinannya akan mengalami kerugian, kalau tidak boleh dibilang tidak pernah rugi.<sup>64</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keuntungan dari bank tersebut dapat diqiyaskan dengan aktivitas *syirkah*.<sup>65</sup> Pendapat Syaltut ini

<sup>62</sup> Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

<sup>63</sup> Rekening Koran adalah hubungan utang piutang yang secara periodik dilakukan perhitungan penyelesaian; dan atau rekening pribadi atau perseorangan di bank (giro). Dalam perbankan Islam, secara operasional dapat dilakukan berdasarkan konsep *wadi'ah* yang memungkinkan pemilik dana untuk dapat menarik dana miliknya sewaktu-waktu, karena dalam *current account* ini bank tidak memberi interest/ bunga kepada pemilik uang tersebut.

<sup>64</sup> Mahmud Syaltut, *al-Fatâwâ*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1403 H/ 1983 M), hal. 251.

<sup>65</sup> Ada tiga bentuk *syirkah*, yaitu; pertama, سرقة الملك. Bentuk ini ada dua yaitu سرقة; سرقة الاجباري الملك (persekutuan dua orang atau lebih dalam memiliki benda perjanjian sebelumnya, seperti pembelian bersama atau penyewaan bersama), dan سرقة الاختيار بالملك (persekutuan dua orang atau lebih dalam memiliki benda dengan tidak adanya perjanjian atau pada saat itu juga).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda dengan pendapat kalangan ulama Mesir saat itu yang menyatakan bahwa keuntungan yang diberikan oleh bank adalah haram.<sup>66</sup>

Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, walaupun tidak memberi keterangan yang jelas tentang bunga (*interest*) yang diberikan kepada uang simpanan penabung, namun kelihatannya mereka bisa mentolerirnya, jika tabungannya berdasarkan bentuk *mudharabah*.<sup>67</sup> Mereka berargumen bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 130.<sup>68</sup> Beberapa dekade kemudian diikuti oleh Muhammad Sayyid Thanthawi (Seorang Mufti Mesir), dan juga didukung oleh Syaikh Muhammad al-Ghazali.<sup>69</sup>

Yûsuf al-Qaradhâwî dalam bukunya *Fawâ'id al-Bunûk Hiyâ al-Ribâ al-Harâm*, memberikan argumen bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta, dan bunga bank juga termasuk riba *nasi'ah* sehingga umat Islam tidak boleh bertransaksi dengan perbankan yang menganut sistem

<sup>66</sup> Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Relita; Kajian Pemikiran Hukum Syekh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003) hal. 351.

<sup>67</sup> *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola, dan apabila kerugian itu diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola-lah yang bertanggung jawab. Ada dua jenis *mudharabah*, pertama, *mudharabah muthlaqah*, merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas, tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Kedua, *Mudharabah muqayyadah*, merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

<sup>68</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Op. Cit*, hal. 76.

<sup>69</sup> Abdul. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Relita; Kajian Pemikiran Hukum Syekh Mahmud Syaltut*, *Op. Cit*, hal. 87.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bunga, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 278-279.<sup>70</sup>

Sedangkan dalam buku beliau *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, bunga bank itu termasuk dalam riba yang berlipat ganda, seperti yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130.<sup>71</sup> Hal ini seperti yang terdapat dalam semua produk perbankan konvensional. Sedangkan apabila produk tersebut dalam perbankan Islam yang berdasarkan syariah, maka halal karena dengan sistem bagi hasil.<sup>72</sup>

### 3.2. Bunga Pinjaman (*Lending*)

Bunga pinjaman atau *landing* adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.<sup>73</sup> Bunga dalam pinjaman<sup>74</sup> ini banyak sekali yang memperbincangkannya, baik dalam era klasik maupun

<sup>70</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fawâ'id al-Bunûk Hiyâ al-Ribâ al-Harâm*, Op. Cit, hal. 83.

<sup>71</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, Op. Cit, hal. 254.

<sup>72</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), hal. 185.

<sup>73</sup> Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Bila kita perhatikan neraca bank, akan terlihat oleh kita bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila kita mengamati sisi pendapatan bank, akan bisa kita temui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan propisi kredit.

<sup>74</sup> Mayoritas ulama Mesir mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Dengan adanya dua macam pinjaman tersebut, maka akan timbul bunga pinjaman. Bunga pinjaman dapat diklasifikasikan dalam dua bagian juga, yaitu bunga pinjaman konsumtif dan bunga pinjaman produktif. Bunga pinjaman konsumtif adalah debitur mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pinjaman orang-orang lemah, pinjaman orang-orang yang punya hutang. Mereka sangat berkesusahan dalam menopang hidupnya sehingga salah satu jalannya adalah meminjam uang dengan harapan mereka akan tertolong kebutuhannya, tapi harapan itu punah karena mereka mengembalikannya dengan disertai bunga. Sedangkan bunga pinjaman produktif yaitu pinjaman yang diambil seseorang tidak dipakai, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya, karena ia tidak memiliki modal atau karena modalnya tidak cukup untuk menjalankan usahanya. Dari usahanya akan mendapat keuntungan yang ia peroleh dari pinjaman ini di masa yang akan datang dan akan membagikan keuntungannya kepada bank yang berupa bunga. Lihat Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, Terj. Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

neo klasik. Apakah bunga tersebut dapat dibayarkan atau tidak? Ini dapat dilihat dari beberapa tokoh yang memperdebatkan, mengapa bunga pinjaman itu harus dibayarkan dan harus diterima, dan apakah hukum dari bunga pinjaman tersebut. Dalam hal mengapa bunga harus dibayarkan, ada beberapa tokoh ekonomi klasik dan neo klasik yang pro dan kontra dalam memberikan pandangan mengenai pembayaran bunga. Dalam karyanya *politics*, Aristoteles membandingkan uang dengan ayam betina yang mandul yang tidak bisa bertelur. Menurut beliau, sekeping mata uang tidak bisa beranak dengan kepingan uang yang lain. Pendapat ini didukung oleh Keynes. Beliau berpendapat bahwa tingkat pendapatan lebih menjamin persamaan antara tabungan dan investasi dari pada suku bunga.<sup>75</sup>

Para ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith, Ricardo, dan lain-lain, menganggap bunga sebagai ganti rugi yang dibayarkan si peminjam kepada yang meminjamkan, untuk laba yang akan dibuat si peminjam dengan menggunakan uang dari pihak yang meminjamkan. Ricardo mengatakan, “Kalau memang banyak yang dapat dilakukan dengan menggunakannya, banyak pula yang dapat diberikan dengan menggunakannya.”<sup>76</sup>

Kemudian aliran para ahli ekonomi neo klasik seperti Bohm dan Bawerk memasukkan ide mengenai preferensi waktu dalam menjelaskan mengapa bunga dibayarkan. Menurutnya, bunga timbul karena orang lebih menyukai barang di masa akan datang, dan karena kepuasan di masa itu. Kalau dinilai dengan pendirian waktu sekarang yang mengalami diskonto,

<sup>75</sup> Muhammad Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 119.

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 120-121.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka bunga adalah diskonto harga. Ada tiga alasan mengapa dia berpendapat demikian diantaranya: (1) Pandangan yang rendah terhadap perspektif masa depan. (2) Kelangkaan relatif barang sekarang dibandingkan dengan barang di masa yang akan datang. (3) Keunggulan teknis atas barang di masa yang akan datang.<sup>77</sup>

#### 4. Perdebatan tentang Bunga Bank di Kalangan Ulama

Adapun yang menjadi masalah dalam sistem ekonomi keuangan sekarang ini adalah, apakah riba yang berarti tambahan itu sama dengan rente (bunga) atau tidak? Bagaimana kedudukan bank dalam masalah ini?

Persoalan bunga bank telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia tidak menyatakan halalnya bunga bank. Tetapi terdapat kelompok tertentu, baik di kalangan NU maupun Muhammadiyah yang belakangan mengelola modal semacam ini, kendati tidak sejalan dengan “Keputusan Fiqh” mereka.

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, seorang pemikir ekonomi Islam terkemuka, lembaga perbankan dalam perekonomian modern mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan sarana-sarana yang diciptakannya dan kemudahan-kemudahan yang diberikannya, bank telah berhasil menjadi lembaga yang memiliki peran penting dalam dunia keuangan, karena bank memudahkan pertukaran, membantu pembentukan modal dan kemungkinan-kemungkinan berproduksi dalam skala massal. Dengan demikian, bank dalam

<sup>77</sup> Ibid, hal. 122-123.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem perekonomian sekarang ini, memainkan peranan yang menentukan dalam mengalokasikan sumber-sumber keuangan yang tersedia dalam masyarakat. Selain itu, masih banyak lagi peranan-peranan dan fungsi bank yang bermanfaat bagi manusia dalam perekonomian modern. Maka lembaga perbankan dapat dibenarkan dari sudut pandang ajaran Islam. Pendapat ini didukung oleh Syukri Ghazali. Jadi bunga bank itu hukumnya boleh kalau melihat dari fungsi dan perannya.<sup>78</sup>

Wahbah al-Zuhaili membahas hukum bunga bank dengan menggunakan sudut pandang teori fiqih klasik. Menurutny, bunga bank termasuk riba *nasi'ah*, karena bunga bank termasuk kelebihan atau tambahan yang dipungut dengan tidak disertai imbalan, melainkan semata-mata karena penundaan tenggang waktu pembayaran.<sup>79</sup>

Yûsuf al-Qaradhâwî berpendapat bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk dalam riba *nasi'ah*.<sup>80</sup> Sedangkan dalam bukunya *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, al-Qaradhâwî juga berpendapat bahwa bunga bank haram karena termasuk perolehan yang berlipat ganda.<sup>81</sup>

A. Hassan Bangil, Guru Besar Persatuan Islam –sebagaimana yang dikutip Qureish Shihab- mengemukakan bahwa ayat-ayat al-Qur'ân yang mengharamkan riba tidak ada yang menerangkan batasnya, dan A. Hasan menolak hadis-hadis yang mengharamkan segala macam riba, yakni beliau

<sup>78</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hal. 12.

<sup>79</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), juz: 4, hal. 572.

<sup>80</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fawâ'id al-Bunûk Hiyâ al-Ribâ al-Harâm*, *Op. Cit*, hal. 83.

<sup>81</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, *Op. Cit*, hal. 254.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tidak dapat meyakini bahwa hadis-hadis yang dimaksud betul-betul berasal dari ucapan Nabi. Hanya surat ali-Imran ayat 130 yang melarang riba berlipat ganda. Menurut kaidah ushul fiqih, bahwa dalam satu urusan kalau ada dua keterangan, satu *muthlaq* dan satu lagi *muqayyad*, maka yang dipakai adalah yang *muqayyad*. Contohnya, seorang dokter melarang makan nasi banyak, berarti boleh makan nasi sedikit. Batas sedikit dan banyak itu terserah pertimbangan adat kebiasaan. Jadi menurut kaidah tadi, tidak dilarang riba yang sedikit. Tetapi karena sedikit dan banyak itu tidak ada batasnya, maka dibuat sendiri batasnya dengan memeriksa dan menimbang keterangan-keterangan yang berhubungan dengan urusan-urusan riba, atau membuat batas tertentu kalau kita memiliki kekuasaan.<sup>82</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* memberikan alasan-alasan mengapa Islam mengharamkan riba, yaitu; pertama, riba merupakan penyebab timbulnya permusuhan antara sesama warga masyarakat, dan menghilangkan semangat tolong-menolong antar mereka. Kedua, riba cenderung melahirkan satu kelas di masyarakat yang hidup mewah tanpa bekerja, dan akumulasi kekayaan di tangan kelas itu tanpa ikut berusaha, ibarat benalu yang tumbuh atas kerugian pihak lain. Ketiga, riba adalah penyebab penjajahan. Bukankah negeri-negeri kita pernah mengalami penjajahan yang disebabkan oleh riba. Keempat, Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan, untuk mendapat pahala (dan bukan tambahan).<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 266.

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Thiba'ah wa al-Nasri wa al-Tauzi', 1408 H/ 1988 M), juz. 3, hal. 178.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tokoh lainnya yaitu Quraish Shihab (ahli tafsir Indonesia), setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba, beliau menyimpulkan bahwa ‘*illat* keharaman riba adalah *al-zhulm* (zalim/ aniaya), sebagaimana tersirat dalam surat al-Baqarah ayat 279. Menurutnya, bunga atau tambahan adalah jenis tambahan yang diambil dengan cara *zhulm* (penindasan atau pemerasan), akan tetapi apabila dalam surat Ali Imran ayat 130 menyebut hanya bunga yang berlipat ganda yang diharamkan, atau dapat disebut dengan riba *nasi’ah*, sehingga menurutnya bunga bank adalah halal selama tidak merasa teraniaya (*zhulm*).<sup>84</sup>

Muhammad Rasyid Ridha (ahli tafsir asal Mesir) dengan mengambil pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (ahli fiqh terkemuka dan murid Ibnu Taimiyah) mengemukakan tentang ragam riba dengan ungkapan, “Adapun riba yang terang adalah riba *nasi’ah*, yakni sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyah.” Setelah menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan dan keharaman riba, beliau menyampaikan pernyataan hipotesis “Jika seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain sebagai investasi (modal kerja) dan ia menetapkan prosentasi keuntungan dari hasil usaha, maka itu tidak termasuk riba, karena transaksi ini investasi seperti ini menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan riba yang diharamkan adalah yang menimbulkan kerugian salah satu pihak, menguntungkan pihak lain tanpa suatu usaha.”<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Quraish Shihab, *Lentera Hati (Kisah dan Hikmah Kehidupan)*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), hal. 335.

<sup>85</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz. 3, 113-114.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pandangan tokoh Islam dan ekonom di atas, cukup menggambarkan dua paradigma hukum Islam mengenai bungabank. Pertama, paradigma tekstual yang memahami bunga bank secara induktif. Hal ini berpegang pada konsep setiap utang-piutang yang disertai manfaat atau tambahan adalah riba. Sesungguhnya pendekatan induktif ini berpijak pada teori qiyas yang bersandar pada *'illat jali* (*'illat* yang jelas). Dalam hal riba dan bunga bank keduanya disatukan oleh *'illat* tambahan. Mereka yang berpendapat bunga bank haram adalah Wahbah al-Zuhaili, Yûsuf al-Qaradhâwî, Abu al-A'la al-Maududi, Abu Zahrah, Sayyid Sabiq, dan lain-lain. Kedua, paradigma konstektual yang memahami bunga bank secara deduktif. Menguji asumsi qiyas pada bunga bank terhadap keharaman riba dengan cara menguji konteks masing-masing. Konteks keharaman riba dalam al-Qur'an adalah memungut tambahan hutang kepada pihak-pihak yang seharusnya ditolong, sehingga mereka menyimpulkan *'illat* keharaman riba adalah bersifat *zhulm*. Sedangkan bank adalah lembaga niaga (*tijarah*) yang menjadi mediator antara pihak yang ingin menyimpan modal (investor) dan pengusaha yang membutuhkan modal. Jadi pinjam-meminjam atau utang-piutang, selama perbankan bukan dalam konteks tolong-menolong antara si kaya dan si miskin, melainkan *tijarah* (niaga) untuk mencari keuntungan bersama antara pihak investor, pengusaha dan pihak perbankan. Dalam analisis kontekstual ini, menurut paradigm (cara pandang) kontekstual tidak berlaku qiyas, karena sudah merupakan penerapan dari *istihsan*. Tokoh yang menghalalkan bunga bank di antaranya adalah Quraish Shihab, A. Hasan Bangil, Mahmud Syaltut,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Sayyid Thanthawi, dan Muhammad Nejatullah Shiddiqi.

Menurut Sayyid Muhammad Thanthawi bank konvensional dan deposito itu halal dalam berbagai bentuknya walaupun dengan penentuan bunga terlebih dahulu. Menurutnya, di samping penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan atau penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah perhitungan yang teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan. Tidak mungkin ada kekuatan Islam tanpa ditopang dengan kekuatan perekonomian, dan tidak ada kekuatan perekonomian tanpa ditopang perbankan, sedangkan tidak ada perbankan tanpa bunga. Ia juga mengatakan bahwa sistem ekonomi perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-amal ribawi yang dilarang al-Qur'ân, karena bunga bank adalah muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk terhadap nash-nash yang pasti yang terdapat dalam al-Qur'ân tentang pengharaman riba.<sup>86</sup>

Selain itu, tidak ada unsur pelipatgandaan yang berlebihan dari praktik bunga bank. Pemilik modal yang menitipkan uangnya di bank, oleh pihak bank disalurkan dalam usaha produktif yang menghasilkan. Karena itu, bunga bank yang didapatkan dari modal yang disimpan di bank sebetulnya adalah hasil produksi dari modal tersebut. Mereka yang bertransaksi dengan bank-bank konvensional dan menyerahkan harta dan tabungan mereka kepada bank agar menjadi wakil mereka dalam menginvestasikannya dalam berbagai kegiatan yang dibenarkan, dengan imbalan keuntungan yang diberikan kepada

<sup>86</sup> Muhammad Sayyid al-Thanthawi, *Mu'âmalah al-Bunûk wa Ahkâmuhâ al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar al-Nahdhah Mishr li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1417 H/ 1997 M), hal. 121.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka serta ditetapkan terlebih dahulu pada waktu-waktu yang disepakati bersama orang-orang yang bertransaksi dengannya atas harta-harta itu, maka transaksi dalam bentuk ini adalah halal tanpa *syubhat* (kesamaran), karena tidak ada teks keagamaan di dalam al-Qur'ân atau dari sunnah Nabi yang melarang transaksi di mana ditetapkan keuntungan atau bunga terlebih dahulu, selama kedua belah pihak rela dengan bentuk transaksi tersebut.<sup>87</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah:



Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisa'[4]: 29).*

Jadi dapat disimpulkan dari pendapat al-Thanthawi di atas bahwa penetapan keuntungan terlebih dahulu bagi mereka yang menginvestasikan harta mereka melalui bank-bank atau selain bank adalah halal dan tanpa *syubhat* dalam transaksi itu. Ini termasuk dalam persoalan al-Mashalih al-Mursalah, bukan termasuk persoalan aqidah atau ibadat-ibadat yang tidak boleh dilakukan atas perubahan atau penggantian.

Al-Thanthawi berpendapat bahwa *riba* hanya terkait dengan pinjaman dari komoditas mudah rusak (*al-qurudh al-istihlakiyyah*) seperti makanan,

<sup>87</sup> *Ibid*, hal. 123.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minuman, dan lain-lain.<sup>88</sup> Pendapat al-Thantawi ini sepertinya keliru, karena ketika ayat al-Qur'ân tentang larangan riba yang diwahyukan kepada Nabi Saw, hal tersebut terkait dengan riba dari pamannya yaitu Abbas. Transaksi ini melibatkan *istitsmariyya*, bukan *istihlakiyyah* seperti yang diklaim oleh al-Thanthawi, karena Abbas seperti pedagang lainnya mengumpulkan semua komoditas *istitsmar* untuk dibawa ke Syam. Pada saat itu, perjalanan dari Makkah ke Syam adalah jarak jauh dan membutuhkan waktu sekitar dua atau tiga bulan, dan perdagangan tidak melibatkan makanan dan minuman.

Sedangkan pendapat al-Thanthawi bahwa jual-beli obligasi pemerintah atau seperti yang dikenal di Mesir dengan nama Sertifikat Investasi diperbolehkan oleh syari'at dan keuntungan yang terdapat dari kepemilikan obligasi itu adalah halal mutlak. Alasannya adalah: (1) Bahwa obligasi (Sertifikat Investasi) adalah gambar lain dari *mudharaba* yang dihalalkan oleh syari'at Islam. (2) Bahwa obligasi sebuah transaksi keuangan baru yang diindikasikan menciptakan manfaat besar kepada bangsa. (3) Obligasi dibeli oleh para investor untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan bukan dengan tujuan mengambil keuntungan atas kebutuhan orang lain. (4) Bunga yang diambil oleh pemegang obligasi adalah satu jenis dengan hadiah atau *hibah*, dan pemerintah bisa memberi bonus dan *hibah* kepada penduduknya yang rasional. Sesuai dengan sabda Nabi: "Barangsiapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu dengan hadiah." Hadiah itu sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'ân "Apabila

<sup>88</sup> *Ibid*, hal. 123-124.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu”. Selain itu, dalam transaksi jual-beli obligasi tersebut tidak terdapat unsur paksaan dan terjadi atas *taradhi* (*mutual consent*) antara dua belah pihak, maka transaksi ini sah dari segi syari’at Islam.<sup>89</sup>

Berdasarkan beberapa alasan inilah kemudiannya lembaga fatwa Republik Mesir berpendapat bahwa obligasi yang dikeluarkan pemerintah adalah halal dan memerintahkan kepada para pejabat di bank sentral Mesir harus mengganti kata bunga yang tercantum dalam obligasi tersebut dengan kata hasil investasi atau laba investasi.

Riba menurut pandangan al-Thantawi adalah peningkatan atau pertambahan modal di mana uang pokok naik beberapa kali lipat karena adanya proses penggandaan uang yang berkelanjutan terhadap perpanjangan tetap dari jangka pembayaran utang. Situasi ini terjadi karena pada awalnya sebagian harta dipinjamkan dengan bunga selama jangka waktu tertentu, sehingga orang yang meminjam tidak mampu membayar, maka jangka waktu pembayaran diperpanjang dengan peningkatan pokok yang besar. Menurutnya bunga bank sendiri merupakan bagian dari perbankan dalam ekonomi modern, sehingga tingkat bunga menduduki hal yang sama penting seperti harga dan mekanisme harga.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> *Ibid*, hal. 125.

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 126.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut analisa penulis meskipun al-Thantawi tidak setuju bahwasanya bunga bank adalah haram, bukan berarti beliau menolak dihapuskannya bunga bank, karena bunga bank sendiri menurutnya ada unsur kezaliman dan harus dimusnahkan. Beliau juga menyatakan bahwasanya bunga bank hanya bisa dihilangkan jika masyarakat dan pemerintah bersatu untuk bekerja sama membangun ekonomi sehingga bunga bank bisa dihilangkan dengan cara menurunkannya ke titik nol persen. Al-Thanthawi menurut penulis lebih melihat ke arah riba konsumtif, yakni bunga yang dibebankan kepada yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup individu dan keluarganya sehari-hari. Hal ini terjadi karena riba tersebut berisi eksploitasi (pemerasan) terhadap orang yang sedang membutuhkan. Beliau juga menekankan pada aspek moral berupa ketidakadilan sebagai bentuk adanya pelarangan riba, sehingga ia mengesampingkan aspek legal formal.

Penulis menyimpulkan bahwasanya riba dan bunga menurut al-Thanthawi merupakan sesuatu yang berbeda, karena riba merupakan sesuatu yang diharamkan oleh nash al-Qur'ân dan hadis, sedangkan bunga diperbolehkan asal tidak berisi pemerasan dan kezaliman bagi masyarakat. Bunga sendiri termasuk bagian dari ekonomi modern yang kedudukannya sama penting dengan mekanisme harga. Dasar hukum yang digunakan al-Thanthawi tentang riba memang berlandaskan ayat-ayat riba yang terdapat di dalam al-Qur'ân dan hadis, dan dalam hal ini beliau memang mengharamkan riba, akan tetapi kesalahan beliau yakni tidak mengharamkan bunga bank. Meskipun dengan alasan menggunakan metode *ijtihad mashlahah mursalah*, akan tetapi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut penulis pandangan beliau hanya berlandaskan pada aspek moral manusianya saja. Menurut penulis, moral tidak bisa dijadikan *'illat* hukum karena moral haruslah sejalan dengan al-Qur'ân dan hadis. Oleh karena itu pendapat beliau tentang bunga bank bersifat lemah dan tidak bisa di jadikan panutan karena tidak sesuai dengan prinsip al-Qur'ân dan hadis.

Penulis lebih sepakat dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa bunga bank termasuk bagian dari riba *nasi'ah*. Adapun riba *nasi'ah* biasa disebut dengan riba jahiliyah.<sup>91</sup> Masyarakat saat ini menyebutnya dengan pembayaran hutang yang ditunda pembayarannya. Sudah diketahui bahwasanya bank sebenarnya enggan untuk melakukan transaksi perdagangan atau investasi. Fokus perhatian bank hanya pada meminjam uang dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak lain yang membutuhkan. Bank memberi bunga kepada nasabah dan menarik bunga dari kreditur. Dengan demikian tugas bank hanya memperjualbelikan hutang. Selain itu, tugas bank yang kedua adalah menciptakan hutang atau meminjamkan sesuatu yang bukan hak miliknya sendiri.

Penulis juga menyimpulkan pengharaman riba bukan atas adanya sebab kezaliman atau pemerasan dari pihak-pihak, melainkan sebagai bagian dari penetapan hikmah syariat diturunkannya ayat-ayat riba. Hikmah sendiri tidak bisa dijadikan *'illat* hukum, karena sifatnya yang tidak tetap. Perlu kita ketahui bahwasanya kemaslahatan saja tidak cukup dijadikan dasar dalam menolak suatu hukum, khususnya hukum penetapan bunga bank. Jumhur ulama juga

<sup>91</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Op. Cit, juz. 6, hal. 623.

berpendapat demikian, bila terdapat pertentangan antara nash dan *mashlahah*, maka nash harus didahulukan.

Penulis juga setuju dengan Wahbah al-Zuhaili yang menggunakan kaidah *sadd zari'ah* dalam menganalisis bunga bank, karena penulis melihat *zari'ah* dari segi kerusakannya yakni *zari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang (menurut kebanyakannya).<sup>92</sup> Hal ini berarti bila *zari'ah* itu tidak dihilangkan sering kali akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang dilarang dan dalam hal ini yakni kasus bunga bank. Bunga bank memang tidak semuanya membawa ke arah riba, akan tetapi dalam praktiknya sering kali dijadikan sarana untuk melakukan riba. Pada masa sekarang ini bunga bank bukanlah suatu keterpaksaan yang harus dipilih, karena sekarang sudah banyak bank-bank Islam yang telah berdiri demi menghapuskan sistem bunga yang ada di dalam perbankan. Wahbah al-Zuhaili sendiri membolehkan bunga bank dalam batasan darurat. Jika memang tidak dapat ditemukan alternatif lain selain bunga bank dalam pelaksanaan ekonomi tersebut, maka boleh saja dilakukan. Dalam konteks *hajjah* dan *darurah*, boleh saja digunakan bunga asalkan ditulis secara sistematis dan dipublikasikan. Adapun alasan *hajjah* dan *darurah* ini hanya akan digunakan di dalam negara-negara yang belum memiliki perbankan Islam sebagai alternatif dalam hal ini hanya bersifat secara kasuistik saja. Apalagi pada masa sekarang ini para pakar ekonomi telah mengupayakan mendirikan bank-bank yang berbasis syari'at Islam yang bebas dari sistem bunga.

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hal. 624.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demi menjaga kehati-hatian dalam memakan harta haram yang berasal dari riba, penulis tetap sependapat dengan Wahbah al-Zuhaili bahwasanya riba adalah haram dan bunga bank adalah haram. Apalagi sudah banyak bank-bank Islam yang berdiri di berbagai negara.

### 5. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung resiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya prosentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.<sup>93</sup>

Terdapat perbedaan imbalan yang berupa bunga dan bagi hasil, yang dijalankan oleh bank konvensional dan bank Islam di dalam operasionalnya, yaitu:<sup>94</sup>

- a. Pada bank konvensional, penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi, sedangkan pada bank Islam penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untuk rugi.

<sup>93</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2005), hal. 40.

<sup>94</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012 ), hal. 39.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pada bank konvensional, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan pada bank Islam, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya tidak mendapat keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- c. Pada bank konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*, sedangkan pada bank Islam, jumlah pada pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- d. Pada bank konvensional, eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk Islam, sedangkan bank Islam, tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.

Agar lebih mudah membedakan antara Bunga pada bank konvensional dan bagi bagi hasil pada bank Islam, maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini:<sup>95</sup>

BUNGA	BAGI HASIL	KETERANGAN
Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung.	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi.	Penentuan Keuntungan
Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase
Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan	Bergantung pada keuntungan proyek, bila	Pembayaran

<sup>95</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Op,Cit, hal. 41.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untung atau rugi.	rugi ditanggung bersama.	
Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat.	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran.
Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya.	Eksistensi

### C. Biografi dan Intelektualitas Yûsuf al-Qaradhâwî

#### 1. Masa Kecil: Kelahiran dan Keluarga al-Qaradhâwî

Nama lengkapnya adalah Yûsuf ‘Abdullah al-Qaradhâwî. Keterangan lain menyebutkan namanya adalah Muhammad Yûsuf al-Qaradhâwî.<sup>96</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî kecil -selanjutnya ditulis al-Qaradhâwî- lahir pada tanggal 9 September 1926 di daerah Saft al-Turab,<sup>97</sup> sebuah kampung kecil yang terdapat di Propinsi Gharbi dengan ibu kota Tanta, Mesir, yang berjarak sekitar 150 Km dari kota Kairo. Dia memiliki nama asli Yusuf, sedangkan al-Qaradhâwî adalah nama keluarga yang diambil dari nama kakeknya, yaitu ‘Ali al-Qaradhâwî. Kata al-Qaradhâwî sendiri sebenarnya merupakan nama dari sebuah daerah yang bernama al-Qaradhah.<sup>98</sup>

Seperti anak kebanyakan, al-Qaradhâwî kecil berasal dari keluarga yang sangat sederhana, namun taat beragama. Ayahnya adalah ‘Abdullah, seorang

<sup>96</sup> Ishom Talimah, *Manhaj Fiqih Yûsuf al-Qaradhâwî*, Terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2001), hal. 3.

<sup>97</sup> Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya seorang sahabat Rasulullah yaitu Abdullah bin Harits bin Abduh. Lihat Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fatwa al-Qaradhâwî*, Terj. Abdurrachman Ali Bauzir, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hal. 339.

<sup>98</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttâb*, (Kairo: Dar al-Suruq, 1430 H/ 2009), juz. 1, hal. 15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petani yang meninggal dunia pada tahun 1928 M. Dengan demikian, kehidupan yatim sudah dilakoni al-Qaradhâwî sudah semenjak masih berusia dua tahun. Semenjak kepergian ayahnya, al-Qaradhâwî kemudian diasuh oleh ibunya, yang juga dibantu oleh pamannya yang bernama Ahmad. Kehidupan duka semakin merundung al-Qaradhâwî kecil, yaitu ketika paman dan ibunya menyusul kepergian ayahnya. Ibunya meninggal ketika al-Qaradhâwî pada saat itu sedang menjalani studi tingkat menengah pertama di al-Azhar. Setelah itu, al-Qaradhâwî kemudian diasuh oleh nenek dan bibinya.<sup>99</sup> Pada usia sembilan tahun enam bulan, al-Qaradhâwî sudah hafal al-Qur'ân dengan baik. Hal ini karena sebelum meninggal, pada saat al-Qaradhâwî berusia lima tahun, pamannya, Ahmad, memasukkannya ke sebuah lembaga pendidikan al-Qur'ân yang ada di desanya yang disebut *kuttâb* yang diasuh oleh Syeikh Hamid Abu Zuwil. Di sinilah al-Qaradhâwî mulai menghafal al-Qur'ân sampai berhasil mengkhatamkannya. Pada saat itu, al-Qaradhâwî tercatat sebagai anak terkecil yang berhasil menghafal al-Qur'ân di kampung itu.<sup>100</sup>

Kemahirannya dalam membaca al-Qur'ân pada usia remaja membuatnya sering dipanggil “Syeikh al-Qaradhâwî” oleh orang-orang sekampungnya. Bahkan karena hal itu pula ia sering ditunjuk menjadi imam shalat, terutama shalat jahar (nyaring).<sup>101</sup> Sedikit sekali yang tidak menangis saat shalat di

<sup>99</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Bar Van Hoeve, 1997), vol. V, hal. 1.448.

<sup>100</sup> Abdurrahman Ali Bauzar (Ed.), *Biodata Dr. Yûsuf al-Qaradhâwî; Fatwa al-Qaradhâwî, Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hal. 399.

<sup>101</sup> *Ibid*, hal. 400.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakang al-Qaradhâwî.<sup>102</sup> Dengan demikian, bakat al-Qaradhâwî untuk kelak menjadi ulama besar sudah terlihat semenjak masa kecilnya.

Salah satu kegemaran al-Qaradhâwî semenjak kecil adalah membaca buku-buku tasawuf, terutama karya Imam al-Ghazali. Buku pertama yang ia baca adalah *Minhâj al-'Abidin*, kemudian *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*. Begitu tertariknya al-Qaradhâwî pada dua kitab tersebut, sehingga pantaslah ia menganggap al-Ghazali merupakan guru pertamanya. Karena itu, kalau dilihat dari *background* kehidupannya, al-Qaradhâwî lebih tampak sebagai seorang pakar tasawuf. Ini dapat dilihat dari kecenderungannya sejak kecil yang suka membaca buku-buku tasawuf tersebut.

Meski menggeluti dunia tasawuf, tidak berarti kemudian ia meninggalkan syariah (kajian tentang hukum). Sebab, bagi dia kehidupan sufistik tanpa diimbangi dengan kesungguhan dalam menjalankan syariah, maka kesufiannya masih belum sempurna. Karena itu, sebagaimana diungkapkan Said Ramadhan al-Buthi, al-Qaradhâwî merupakan sosok sufi terselubung. Dia ingin menyembunyikan kesufiannya dengan tabir penalaran dan salafiyah (masih mengindahkan sisi syariah). Tidak tertutup kemungkinan, dimensi sufistik pada diri al-Qaradhâwî-lah yang membuatnya memiliki corak moderat dalam konstruk pemikiran hukumnya.<sup>103</sup>

Ini terlihat dari sikap al-Qaradhâwî terhadap pendidikan anak-anaknya. Beliau memiliki tujuh orang anak. Empat orang putri dan tiga orang putra.

<sup>102</sup> Musthafa Malaikah, *Manhaj Yûsuf al-Qaradhâwî: Harmoni antara Kelembutan dan Ketegasan*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. xi.

<sup>103</sup> Siti Aminah, "Pengaruh Pemikiran Fiqih Yûsuf al-Qaradhâwî di Indonesia," *Jurnal Ummul Quran*, Vol. V, No 1, Maret 2015, hal. 61-62.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Hebatnya lagi, tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

## 2. Sketsa Intelektual: Riwayat Pendidikan al-Qaradhâwî

Al-Qaradhâwî mengawali jenjang pendidikan formalnya di sekolah dasar dan menengah di sekolah cabang al-Azhar dengan selalu meraih ranking pertama. Karena kecerdasannya, sehingga salah seorang gurunya menggelarnya dengan *'allamah*.<sup>104</sup> Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah Dasar al-Ilzamiyah, kemudian al-Qaradhâwî berangkat ke Tanta untuk mendaftar menjadi murid al-Azhar di tingkat ibtida'i (SLTP), dengan masa tempuh empat tahun, kemudian mendaftarkan diri ke jenjang berikutnya, yaitu pada tingkat tsanawi (SLTA) dengan masa tempuh lima tahun. Di tingkat tsanawi, juga dijalani dengan lancar dan tidak ada hambatan yang signifikan hingga al-Qaradhâwî kemudian melanjutkan studi ke Universitas al-Azhar,

<sup>104</sup> *'Allamah* adalah sebuah gelar yang biasa diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menempuh studi strata satu (S-1) di Fakultas Ushuluddin dengan mengambil jurusan akidah-filsafat. Di universitas ini, al-Qaradhâwî lulus dengan predikat terbaik pada tahun 1952 M.<sup>105</sup>

Semasa di Fakultas Ushuluddin, al-Qaradhâwî banyak sekali mempelajari pemikiran-pemikiran maupun ide-ide dari ulama-ulama terkemuka, khususnya tentang pembaharuan fiqih. Tidak hanya itu, dari fakultas ini pula di kemudian hari al-Qaradhâwî terkenal sebagai ulama kontemporer yang memiliki ciri khas moderasi dalam pemikiran fiqihnya, yaitu fiqih yang sangat kental dengan nuansa al-Qur'ân maupun sunnah dan jauh dari keterkaitan dengan mazhab tertentu maupun ulama terdahulu.<sup>106</sup>

Tidak puas dengan hanya mencukupkan pendidikannya sampai di situ, al-Qaradhâwî kemudian mengambil kuliah strata satu (S-1) lagi di Fakultas Bahasa Arab di universitas yang sama dan menyelesaikannya pada tahun 1954 M. Pada jurusan ini al-Qaradhâwî memperoleh ijazah internasional dan sertifikat (ijazah) mengajar.<sup>107</sup> Selesai menempuh strata satu (S-1) dari kuliah kedua, tepat pada tahun 1957, al-Qaradhâwî melanjutkan studi di Ma'had al-Buhuth wa al-Dirasat al-'Arabiyah al-'Aliyah (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Kearaban), yang merupakan sebuah lembaga studi berada di bawah naungan Liga Arab. Pada lembaga ini al-Qaradhâwî memperoleh gelar diploma

<sup>105</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttâb*, Op. Cit, juz. 1, hal. 15. Lihat juga, Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Op. Cit, Vol. V, hal. 1.448.

<sup>106</sup> Dalam pengantar buku *Fatawa Mu'âshirah*, al-Qaradhâwî memberikan pengakuan bahwa dia terbebas dari belenggu mazhab, sikap taklid dan fanatik terhadap pendapat ulama. Lihat Yûsuf al-Qaradhâwî, *Min Hady al-Islâm: Fatawa Mu'âshirah*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 2000), juz.. 1, hal. 14.

<sup>107</sup> Informasi lain mengatakan bahwa al-Qaradhâwî dalam hal ini mengambil S2, bukan S1. Lihat, al-Qaradhâwî, *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttâb*, Op. Cit, juz. 1, hal. 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi dari Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Masih pada tahun yang sama, yaitu pada 1957 M, al-Qaradhâwî juga melanjutkan studi pada Program Pascasarjana (S-2) di Universitas al-Azhar dengan konsentrasi ilmu tafsir-hadis. Pada jenjang ini al-Qaradhâwî mampu menyelesaikan dalam waktu tiga tahun, yaitu sampai pada tahun 1960 M.<sup>108</sup>

Selesai menempuh S-2, al-Qaradhâwî juga langsung melanjutkan studi pada Program Doktor dan mengambil judul disertasi *al-Zakah wa Atharuha fi Hill al-Masyakil al-Ijtima'iyah* (Zakat dan Dampaknya dalam Menanggulangi Problematika Sosial Kemasyarakatan), yang pada masa berikutnya karya tersebut diterbitkan dalam dua jilid dengan judul *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dlaw'i al-Qur'an wa al-Sunnah* (Fiqh Zakat: Studi Komperatif Mengenai Hukum Zakat dan Filsafatnya Berdasarkan al-Qur'ân dan al-Hadis).<sup>109</sup>

Gelar doktor baru diraihnya pada tahun 1973 dengan peringkat *summa cumlaude*. Disertasi tersebut seharusnya dapat diselesaikan dalam dua tahun lebih cepat, namun karena kondisi politik Mesir yang pada saat itu tidak stabil mengakibatkan beliau menunda pembuatan disertasinya tersebut.<sup>110</sup> Tercatat, al-Qaradhâwî beberapa kali masuk-keluar jeruji karena terlibat dengan pergulatan politik Mesir pada saat itu. Dalam usia yang masih muda, al-

<sup>108</sup> Slamet Arofik, "Elastisitas Hukum Islam Perspektif Yûsuf al-Qaradhâwî," *Jurisdictie*, 2012 - ejournal.uin-malang.ac.id, hal. 168.

<sup>109</sup> *Ibid*, hal. 169.

<sup>110</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *Pasang Surut Gerakan Islam*, Terj. Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Da'wah, 1987), hal. ii.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qaradhâwî sudah aktif dan bergabung dalam sebuah organisasi perjuangan yang dikenal dengan sebutan Ikhwan al-Muslimin.<sup>111</sup>

Selain pendidikan formal tersebut, konstruk pemikiran al-Qaradhâwî juga dipengaruhi atau diinspirasi oleh beberapa ulama besar. Di antara mereka seperti Hasan al-Banna, pendiri dan pemimpin gerakan *Ikhwan al-Muslimin*. Karena itu, al-Qaradhâwî selalu mengikuti ceramah Hasan al-Banna pada saat itu. Selain sosok pendiri *Ikhwan al-Muslimin* tersebut, al-Qaradhâwî juga terinspirasi oleh tokoh-tokoh lain. Pemikiran al-Qaradhâwî juga dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Syaltut, Syeikh al-Ghazali, dan Abdul Halim Mahmud. Meskipun beliau dipengaruhi tokoh-tokoh tersebut, tetapi tidak menjadikan dirinya taklid buta kepada pemikiran tokoh-tokoh yang dikaguminya. Hal ini sebagaimana dikatakan al-Qaradhâwî dalam bukunya *Fatwa Kontemporer* bahwa di antara nikmat Allah pada dirinya adalah terbebasnya dia sejak dini dari ikatan mazhab, taklid dan *ta'ashshub* (fanatik) pendapat seorang alim tertentu meskipun secara fiqih al-Qaradhâwî bermazhab Hanafi.<sup>112</sup>

### 3. Karir dan Aktivitas al-Qaradhâwî

Sejak usia muda al-Qaradhâwî selalu memberi fatwa atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh khalayak, semenjak masih menjadi mahasiswa tingkat pertama di Universitas al- Azhar. Ia bertugas mengimami shalat berjamaah, menyampaikan khutbah dan memberi pelajaran kepada khalayak. Selain itu, al-Qaradhâwî terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani

<sup>111</sup> *Ibid*, hal. iv.

<sup>112</sup> *Ibid*, hal. v.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah Masjid di daerah Zamalik. Alasannya khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.<sup>113</sup>

Dalam perjalanan hidupnya, al-Qaradhâwî pernah mengenyam “Pendidikan” di penjara sejak mudanya saat Mesir dipegang oleh Raja Faruk. Beliau masuk penjara tahun 1949, saat umurnya 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.<sup>114</sup>

Selain itu, al-Qaradhâwî pernah menjadi pengawas pada akademi imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu, al-Qaradhâwî pindah ke bagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini, al-Qaradhâwî bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.<sup>115</sup>

Pada tahun 1961, ia ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah menengah di Qatar. Beliau berhasil melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu dengan menggabungkan antara khazanah klasik dan kemodernan. Pada tahun 1977, al-Qaradhâwî ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama Fakultas Syari’ah Studi Islam di Universitas Qatar. Beliau menjadi dekan fakultas itu hingga tahun ajaran

<sup>113</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *Hadyu al-Islâm: Fatâwâ Mu’âshirah*, Op. Cit, hal. 24.

<sup>114</sup> *Ibid*, hal. 25.

<sup>115</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Op. Cit, hal. 148.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1989-1990. Pada tahun 1990-1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi ketua majelis ilmiah pada semua universitas dan akademi negeri itu.<sup>116</sup>

Sebagai seorang ilmuan dan da'i, al-Qaradhâwî aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun diluar dunia Islam. Beliau menunjukkan cita-cita luhur untuk mengembalikan Islam pada sumber aslinya yaitu al-Qur'ân dan sunnah, baik dalam pandangan hidup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam mengembangkan wawasan dan cita-citanya untuk mengembalikan kemurnian Islam, maka beliau giat dalam mengikuti berbagai seminar Undang-undang Islam di Libiya, Muktamar I Tarikh Islam di Beirut, Muktamar Internasional I mengenai Ekonomi Islam di Makkah, Muktamar Hukum Islam di Riyadh, dan sebagainya.<sup>117</sup>

Selain itu, al-Qaradhâwî juga dikenal sebagai salah satu ulama yang berperan aktif didalam mengembangkan dan mengenalkan sistem Perbankan Islam. Beliau juga salah satu ulama yang turut mendukung terbentuk IDB (Islam Developmen Bank). Beliau juga salah satu ulama terkemuka di dunia yang menghadiri konferensi II KKID (Konsul Kajian Islam Dunia), pada bulan Muharram 1385 H bertepatan pada bulan Mei 1965 di Universitas al-Azhar, Kairo. Dalam konfrensi tersebut diputuskan tidak ada lagi keraguan praktek pembungaang uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.<sup>118</sup>

#### 4. Karya-karya al-Qaradhâwî

<sup>116</sup> Yusuf al- Qaradhawi, *Hadyu al-Islâm: Fatâwâ Mu'âshirah*, Op. Cit, hal. 21.

<sup>117</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Op. Cit, hal. 149.

<sup>118</sup> *Ibid*, hal. 151.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penguasaan yang luas dan mendalam tentang ilmu agama serta pengetahuan umum tercermin pada karya-karya al-Qaradhâwî. Lebih dari seratus judul buku yang telah diterbitkan, meliputi ilmu al-Qur'ân, hadis, fiqh, dan Ushul Fiqih, akidah, sejarah serta peradaban, politik Islam, dan ekonomi Islam. Misalnya, buku *Fiqh al-Zakâh*, sebagai studi kasus, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia setebal 11.186 halaman, merupakan kitab pertama yang membahas secara lengkap dan luas seluk-beluk hukum zakat, mulai dari zakat pribadi, zakat karyawan atau zakat profesi, hingga zakat lembaga atau perusahaan.

Dalam bidang fiqh dan Ushul Fiqih, al-Qaradhâwî telah menulis sedikitnya 14 buah buku, antara lain *al- alâl wa al- arâm fî al-Islâm* (Halal dan Haram dalam Islam), *al-Ijtihâd fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Ijtihad dalam Syariat Islam), *Fiqh al-Shiyâm* (Hukum Tentang Puasa), *Fiqh al-Thahârah* (Hukum Tentang Bersuci), *Fiqh al-Ghinâ' wa al-Musîqa* (Hukum Tentang Nyanyian dan Musik), dan sebagainya.

Dalam bidang ekonomi Islam, karya al-Qaradhâwî antara lain *Fiqh al-Zakât*, (Fiqh tentang Zakat), *Bai'u al-Murâba ah li al-Amri bi al-Syira*; (Sistem Jual Beli Murabahah), *Fawâid al-Bunûk Hiya al-Ribâ al- arâm*, (Bunga Bank adalah Riba yang Diharamkan), *Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq fî al-Iqtishâd al-Islâmî* (Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam), serta *Daur al-Zakât fî 'Ilâj al-Musykilât al-Iqtishâdiyyât* (Peranan Zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bidang al-Qur'ân dan al-sunnah, al-Qaradhâwî sudah menulis antara lain *al-'Aql wa al-'Ilm fî al-Qur'ân* (Akal dan Ilmu dalam al-Qur'ân), *al-Shabru fî al-Qur'ân* (Sabar dalam al-Quran), *Tafsîr Sûrah al-Ra'd*, dan *Kaifa Nata'âmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Bagaimana Berinteraksi dengan Sunnah).

Dalam bidang aqidah, al-Qaradhâwî menulis sekitar empat buku, antara lain *Wujûd Allah* (Adanya Allah), *Haqiqat al-Tauhîd* (Hakikat Tauhid), *al-Îmân bi al-Qadr* (Keimanan kepada Qadar). Bidang tasawwuf, misalnya *al-âyat al-Rabbâniyyah wa 'Ilmu, al-Niyyah wa al-Ikhlâsh, al-Tawakkul, al-Taubat ila Allâh*, dan sebagainya. Hingga saat ini, ratusan buku telah ia tulis dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Buku-buku al-Qaradhâwî membahas berbagai hal terkait kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mulai dari urusan rumah tangga hingga negara dan demokrasi.<sup>119</sup>

### 5. Konstruk Pemikiran Hukum al-Qaradhâwî

Pada masa-masa awal formatif Islam, setiap permasalahan dan persoalan terkait dengan realitas aktual yang dihadapi umat Islam ketika itu bisa langsung ditanyakan kepada Nabi Saw, dan seketika itu pula jawaban bisa langsung diperoleh melalui wahyu yang turun. Realitas semacam ini secara tidak langsung berimplikasi kepada kesimpulan sementara bahwa jawaban yang disampaikan Nabi Saw (wahyu) terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut,

<sup>119</sup> Dikases tanggal 2 Agustus 2016 dari <http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-Qaradhawi.html>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan jawaban yang temporal dan kasuistik, sehingga belum tentu bisa diterapkan pada semua manusia yang memiliki kasus yang sama. Namun berbeda situasi maupun kondisi, apalagi berbeda jaman, karena tidak semua jawaban Nabi Saw ketika itu dapat disesuaikan serta cocok jika diterapkan pada obyek maupun konteks yang berbeda.

Sepeninggal beliau, sosoknya sebagai Nabi tidak ada yang menggantikan. Karena itu, umat Islam pada masa berikutnya berpedoman kepada ayat-ayat al-Qur'ân serta sabda-sabda Nabi Saw yang sempat dikumpulkan. Dengan berpedoman kepada dua hal tersebut, muncul berbagai pandangan ulama terkait berbagai persoalan, sehingga di antara mereka ada yang memiliki pandangan yang sama dan ada pula yang saling berbeda. Pada konteks ini, muncullah terminologi *ijma'* untuk pendapat-pendapat yang sama, serta *ikhtilaf* untuk pendapat-pendapat yang saling berbeda. Dalam pada itu, analogi atau *qiyas* adalah di antara metode *istinbath* hukum yang populer pada saat itu.<sup>120</sup>

Ilustrasi tersebut mendeskripsikan sebuah kenyataan bahwa hukum Islam bersumber pada wahyu atau teks yang bersifat permanen, final dan tidak mungkin berkembang, baik berupa al-Qur'ân maupun hadis, namun secara *de facto* hukum Islam tidak bisa dikatakan telah final. Hukum Islam akan terus berkembang dan bersesuaian seiring berbedanya situasi kondisi maupun

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berubahnya zaman,<sup>121</sup> karena hukum Islam memiliki faktor-faktor dan dimensi-dimensi yang menyebabkannya tidak mengalami stagnasi dan finalisasi.

Pada konteks ini, al-Qaradhâwî mengatakan bahwa syariat Islam bisa menerima perubahan serta bisa menerima pembaharuan, karena syariat Islam didasari atas beberapa hal. Di antaranya adalah memiliki nilai orsinalitas (*al-ashalah*) serta memiliki karakteristik (*al-khashaish*) yang berbeda dengan hukum maupun Undang-undang lain yang ada di muka bumi ini. Perbedaan tersebut baik dari segi sumber, pijakan, tujuan ataupun orientasinya, sehingga hukum Islam berpeluang untuk dilakukan pembaharuan (*tajdid*) dan bisa dilakukan perubahan (*taghyir*).<sup>122</sup>

Pandangan al-Qaradhâwî tersebut, misalnya, dapat dilacak dalam bukunya, *al-Fiqh al-Islâmî bain al-Ashalât wa al-Tajdîd*, di mana pada kesempatan tersebut al-Qaradhâwî mengemukakan sebelas karakteristik yang dimiliki hukum Islam yang menjadi landasan pacu atas dinamikanya.<sup>123</sup> Karakteristik tersebut meliputi berasaskan ketuhanan, dalam hal ini adalah wahyu, bersifat keagamaan, kemanusiaan, komprehensif, moralitas, universal, sistematis dan tematik, moderat, keseimbangan antara individu dan kolektif, memiliki teori dan kaidah umum serta mampu berkembang dan diperbarui. Karakteristik terakhir inilah yang oleh al-Qaradhâwî dinilainya sebagai

<sup>121</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Alamîn*, (Kairo: Maktabat al-Kulliyah al-Azhariyah, 1969), juz.3, hal. 13.

<sup>122</sup> Yusuf al- Qaradhawi, *Hadyu al-Islâm: Fatâwâ Mu'âshirah*, *Op. Cit*, hal. 23.

<sup>123</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *al-Fiqh al-Islâmî bain al-Ashalât wa al-Tajdîd*, *Op. Cit*, hal. 17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*khashais* yang memberikan ruang gerak terhadap hukum Islam untuk berkembang dan mengadakan pembaharuan.<sup>124</sup>

Untuk mempertegas hal tersebut, al-Qaradhâwî secara lebih tegas mengemukakan bahwa tidak seluruh ayat al-Qur'ân menunjukkan *qath'i al-dilalah*, meskipun seluruhnya merupakan *qath'i al-tsubut*. Begitu juga tidak semua hadis berupa *zhanni al-dilalah*, meskipun hampir seluruhnya *dzanni al-tsubut*. Berdasarkan atas *tsubut* dan *dilalah*-nya ini, ulama kemudian menetapkan dua jenis hukum yang disebut dengan *qath'i* dan *zhanni*. Mereka sepakat bahwa ranah ijtihad boleh dilakukan pada jenis hukum yang kedua ini, dan di sini terdapat yang disebut Ali Yafie sebagai ruang gerak ijtihad.<sup>125</sup>

Penegasan terkait dinamika hukum Islam di atas kemudian dibasiskan oleh al-Qaradhâwî pada sebuah landasan normatif, yaitu dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Saw pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan selalu mengutus orang yang akan memperbarui agama di setiap paruh seratus tahun (satu abad)."<sup>126</sup> Ini sebagai bukti bahwa agama adalah sesuatu yang senantiasa berdialog dan berkompromi dengan realitas kehidupan manusia yang selalu berproses berkembang.<sup>127</sup>

Hadis tersebut secara tidak langsung memberikan ruang gerak terhadap hukum Islam dalam kurun atau waktu tertentu untuk mengalami pembaharuan-

<sup>124</sup> Hukum Islam yang masuk pada kategori ibadah *mahdhah* tidak boleh dikembangkan, apalagi diperbarui, sedangkan lainnya bisa dijabarkan serta penerapannya berlaku proses kontekstualisasi. Lihat Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, (Demak: Demak Press, 2002), hal. 11-12.

<sup>125</sup> Ali Yafie, "Posisi Ijtihad dalam Keutuhan Ajaran Islam," dalam Jalaluddin Rahmat, (ed) *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), 75-78.

<sup>126</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn al-As'ad al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), juz. 4, hal. 91. Lihat juga, al-Qaradhâwî, *al-Fiqh al-Islâmî bain al-Ashalât wa al-Tajdîd*, Op. Cit, hal. 23.

<sup>127</sup> *Ibid*, hal. 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembaharuan melalui *mujaddid*, baik perorangan ataupun kelompok. Dalam hal ini, sejarah telah mencatat beberapa nama terkenal yang disebut-sebut sebagai *mujaddid*, di antaranya adalah ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz, Imam al-Syafi‘i, Abu al-Hasan al-Asy‘ari, Abu Hamid al-Ghazali, Abu Daqiq al-‘Id dan lain sebagainya.<sup>128</sup>

### 6. Hierarki Sumber Hukum menurut al-Qaradhâwî

Sebelumnya telah diketahui, bahwa wawasan dan keilmuan al-Qaradhâwî yang demikian luas, serta terinspirasi oleh berbagai ulama besar dengan berbagai corak pemikiran, telah membuat seorang al-Qaradhâwî sebagai pemikir yang moderat. Kemoderatan al-Qaradhâwî ini tidak hanya terlihat secara implisit dari setiap produk-produk pemikirannya, tetapi hal ini secara implisit juga sering disebutkannya di berbagai kesempatan.

Menurut al-Qaradhâwî, pemecahan masalah fiqih yang terbaik adalah yang paling jelas landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pemikirannya dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman.<sup>129</sup> Dengan memenuhi hal-hal tersebut, seseorang akan mampu memadukan hukum- hukum syariat dan tuntutan zaman.<sup>130</sup> Dengan pernyataan ini, al-Qaradhâwî sebenarnya sedang menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki fanatisme kemazhaban, meskipun secara pribadi ia bermazhab Hanafi.

Terkait dengan sumber hukum, al-Qaradhâwî tidak memiliki pandangan yang berbeda dengan kebanyakan para ulama. Menurutny, sumber hukum

<sup>128</sup> *Ibid*, hal. 24-25.

<sup>129</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *Hadyu al-Islâm: Fatâwâ Mu‘âshirah*, Op. Cit, juz. 1, hal. 11.

<sup>130</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *Islam Berbicara Seni*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, (Solo: Era Intermedia, 2002), hal. 196.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam secara fundamental terdiri dari al-Qur'ân, al-sunnah, ijma' (konsensus), dan qiyas (analogi). Al-Qur'ân, menurut al-Qaradhâwî adalah sumber pertama hukum Islam. Al-Qur'ân adalah kitab yang sesuai dengan perjalanan waktu, tidak bisa diasumsikan hanya mewakili satu masa atau mewakili pemikiran generasi tertentu, al-Qur'ân tetap eksis dan kekal seperti halnya ketika diturunkan oleh Allah sejak pertama kali. Al-Qur'ân adalah ruh *Rabbani*, yang dengannya akal dan hati menjadi hidup. Ia juga *dustur Ilahi* yang mengatur kehidupan individu bangsa-bangsa. Allah menurunkannya secara berangsur-angsur, sesuai kejadian yang berlangsung, sehingga menurut al-Qaradhâwî, al-Qur'ân menjadi lebih melekat dalam hati, lebih dipahami oleh akal manusia dan menuntaskan masalah-masalah dengan ayat-ayat Allah Swt.<sup>131</sup>

Terkait dengan sunnah, al-Qaradhâwî juga memandang sunnah sebagai sumber syariat kedua, sebagai penjelasan analisis dan praktis amaliah bagi al-Qur'ân.<sup>132</sup> Dengan posisi tersebut, sunnah memiliki tujuan untuk membimbing hidup dan kehidupan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Karena itu, sebagaimana dinyatakan al-Qaradhâwî, sunnah Nabi Saw adalah *manhaj* yang terinci bagi kehidupan seorang Muslim dan masyarakat Muslim yaitu *manhaj* yang merupakan penafsiran al-Qur'ân dalam praktik atau Islam adalah penjabaran secara konkrit.<sup>133</sup>

<sup>131</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *Bagaimana Berinteraksi dengan al-Qur'an*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 26.

<sup>132</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 46.

<sup>133</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *al-Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban*, Terj. Setiawan Badi Utomo, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. xi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber hukum berikutnya adalah *ijma'* atau konsensus para ulama. Terkait dengan persoalan *ijma'*, al-Qaradhâwî menegaskan bahwa *ijma'* merupakan syarat bagi para mujtahid, sehingga dalam memberikan fatwa atau menetapkan sesuatu hukum tidak bertentangan dengan hasil *ijma'* yang telah ditetapkan para mujtahid sebelumnya.<sup>134</sup>

Menurut al-Qaradhâwî, *ijma'* itu penting, bahkan sangat penting sekali, meskipun dasar hukum yang konsisten itu nash. Karena adanya *ijma'* di sini telah memberikan faedah yang sangat besar, yaitu penyatuan pemahaman nash, memindahkannya dari *dilalah* yang *zhanni* kepada yang *qath'i*, dan memasukkan nash saat itu dalam medan yang tertutup untuk pengembangan dan perubahan ijtihad. *Ijma'* di sini memberikan faedah *dalalah* yang *qathi'i*, melindungi nash dari permainan atau mentakwilkan tafsirnya dengan pentakwilan yang keluar dari ketentuan konsensus ummat.<sup>135</sup>

Sebagaimana *ijma'*, *qiyas* juga mendapat perhatian khusus bagi al-Qaradhâwî. Dalam hal ini, *qiyas* dipahami oleh al-Qaradhâwî sebagai upaya memasukkan masalah yang tidak dicantumkan ketentuan hukumnya kepada masalah lain yang telah ditentukan hukumnya. Hal itu karena sebab (*'illat*) yang menggabungkannya dan tidak terdapat perbedaan prinsip antara kedua masalah tersebut, serta tidak ada penghalang yang berarti, maka wajib mengambilnya.<sup>136</sup>

Menurut al-Qaradhâwî, inspirasi untuk melakukan hal tersebut disokong oleh landasan normatif al-Qur'ân, yaitu berupa perintah untuk mengembalikan

<sup>134</sup> *Ibid*, hal. xii.

<sup>135</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern*, Op. Cit, hal. 66.

<sup>136</sup> *Ibid*, hal. 67.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah-masalah yang diperselisihkan diantara umat Islam kepada Allah dan Rasul. Ini berarti perintah menggunakan qiyas tatkala tidak menjumpai nash atau ijma, sebab pengertian qiyas tersebut berarti mengembalikan masalah yang diperselisihkan dikembalikan kepada Allah dan Rasul.<sup>137</sup>

Secara umum, qiyas terkait dengan ketentuan-ketentuan tertentu. ketentuan-ketentuan tersebut terkait dengan operasional qiyas itu sendiri, yaitu sebagai berikut;<sup>138</sup>

- a. *Al-ashl* sebagai sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nash, yang dipakai sebagai ukuran, yang dipakai sebagai ukuran.
- b. *Al-far'u* sebagai perkara yang ditentukan kedudukan hukumnya.
- c. *Al-'illah* sebagai alasan untuk menentukan kedudukan *al-far'u*.
- d. *Hukum al-ashl* sebagai hukum baru yang ditetapkan *al-far'u*.

Di antara catatan-catatan al-Qaradhâwî terkait dengan qiyas adalah pendiriannya bahwa penggunaan qiyas tidak digunakan dalam *ta'abbudiyyah* (ibadah murni), hal ini karena tidak adanya *'illat* secara terperinci, seperti: shalat, puasa, haji, dan sebagainya.<sup>139</sup> Analogi atau qiyas adalah salah satu jalur atau metode untuk mengembangkan hukum Islam. Hal ini terjadi ketika sesuatu perkara yang belum tersentuh secara hukum kemudian diketahui hukumnya, yaitu dengan mencari kesamaannya pada kasus-kasus yang identik.

## 7. Elastisitas Hukum Islam Perspektif al-Qaradhâwî

<sup>137</sup> Masdar Helmi, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hal. 95.

<sup>138</sup> Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 62.

<sup>139</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern, Op. Cit*, hal. 69.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pembaruan hukum Islam terkadang disebut juga dengan elastisitas hukum Islam. Hal ini karena berngkat dari sebuah asumsi mainstream bahwa hukum Islam bersifat final dan berada pada titik stagnasinya. Karena itu, untuk menggambarkan sebaliknya dimunculkan istilah elastisitas hukum Islam. Eksistensi karakteristik hukum Islam tersebut berimplikasi kepada muncul dan tumbuhnya faktor-faktor yang menyebabkan hukum Islam elastis serta berpeluang untuk berkembang.

Tidak hanya itu, hukum Islam juga memiliki medan yang luas sehingga para ahli bisa berperan mengisi medan tersebut dengan “penemuan-penemuan” yang belum tercover dalam nash agama. Dalam bukunya, *‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-Islamiyah*, al-Qaradhâwî menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menjadikan elastisitas hukum Islam ada lima, sebagai berikut:<sup>140</sup>

a. Luasnya margin yang dimaafkan

Adapun yang dimaksud dengan yang “dimaafkan” di sini adalah segala hal yang tidak dinyatakan secara tegas hukumnya di dalam syariat. Dalam hal ini, di dalam syariat hanya dijumpai dalil-dalil normatif yang menunjukkan batasan-batasan secara luas. Hal ini misalnya hadis; “Sesungguhnya Allah telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian sampai melampauinya. Allah telah mewajibkan hal-hal tertentu maka jangan sampai kalian abaikan. Allah telah mengharamkan hal-hal tertentu, maka jangan sampai kalian melakukannya, Allah telah mendiamkan banyak

<sup>140</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *‘Awâmil al-Sâ’ah wa al-Murûnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), hal. 103-132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal, bukan karena lupa, melainkan sebagai rahmat bagi kalian maka jangan sampai kalian mencari-carinya.”<sup>141</sup>

Hadis Nabi Saw di atas, tepatnya kata “فلا تبحثوا ها” merupakan *khitab* yang ditunjukkan kepada para sahabat pada masa turunnya wahyu. Nabi Saw melarang para sahabat untuk tidak menanyakannya karena dengan demikian berarti mereka telah mencegah bertambahnya beban, baik itu berupa perintah melakukan sesuatu atau larangan-larangan baru, akibat sikap memperanyakan hal itu.

Istilah yang diambil oleh al-Qaradhâwî berupa situasi atau medan netral yang dimaafkan atau "منطقة العفو" merupakan konklusi dari hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh sahabat Salman; “Segala hal yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam al-Qur’ân maka itu semua halal, segala hal yang telah diharamkan-Nya maka itu semua haram, sedangkan segala hal yang tidak disinggung-Nya maka itu adalah kema’afan. Karena itu, terimalah kema’afan Allah tersebut, karena Allah tidak pernah melupakan sesuatu pun.”<sup>142</sup>

Berdasarkan hadis tersebut tampak jelas sekali bahwa Allah Swt telah memberikan batasan kongkrit kepada hamba-Nya atas segala hal yang telah dihalalkan oleh-Nya dan segala hal yang diharamkan-Nya. Sedangkan apapun yang tidak disebutkan dalam kitab-Nya, bukan berarti Allah Swt lupa dengan hal tersebut, akan tetapi justru merupakan rahmat bagi hamba-

<sup>141</sup> Muhammad ibn ‘Abdillah Abu ‘Abdillah al-Hakim al-Nisaburi, *al-Mustadrak*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 12.

<sup>142</sup> Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Ali ibn Musa al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1408 H/ 1988 M), juz. 3, hal. 312.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nya agar diambil kemudian memilah dan memilih mana yang lebih baik dan mana yang lebih cocok dengan kondisinya demi keberlangsungan hidup. Al-Qaradhâwî kemudian memunculkan istilah tersebut.

Berdasarkan logika seperti ini, segala hal yang tidak disebutkan oleh Allah Swt, segala hal yang tidak tersentuh oleh nash menunjukkan atas sedikitnya beban kewajiban dan perluasan sektor kemaafan yang ada dalam fiqih Islam. Hal itu bukan terjadi karena kebetulan, melainkan disengaja dan menjadi tujuan utama bagi pembuat syariat. Allah Swt menghendaki syariat ini bersifat umum, abadi dan relevan dengan setiap waktu, ruang dan kondisi.

Luasnya medan netral di atas, didukung dengan semakin beragamnya persoalan yang belum memiliki stastus hukum, secara tidak langsung berimplikasi pada para mujtahid untuk kreatif berijtihad dalam mengisinya. Dalam rangka mengisi medan tersebut, para mujtahid memiliki dan menggunakan metode-metode *istinbath* yang berbeda, satu dengan yang lain tidak sama, seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, dan *'urf*.

#### b. Besarnya perhatian nash terhadap hukum-hukum universal

Faktor kedua ini dilatarbelakangi adanya fakta bahwa sebagian besar nash atau teks al-Qur'ân hanya memuat prinsip-prinsip umum dan memuat hukum yang bersifat universal. Dalam hal ini, sebagaimana dikatakan al-Qaradhâwî, nash tidak membicarakan hal-hal yang bersifat rinci, kongkrit maupun bersifat teknis, kecuali pada hal-hal yang bersifat abadi dan langgeng. Pada hal-hal yang bersifat langgeng ini nash memberikan rincian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kongkrit dan memberikan keterangan bersifat teknis. Misalnya hukum yang berkaitan dengan ibadah, perkawinan, perceraian, warisan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini nash akan menjelaskan dengan rinci karena mencegah adanya *bid'ah* (kreatifitas) dan terjadinya pembaruan yang menyesatkan, menyulitkan dan memberatkan.

Pada konteks ini, al-Qaradhâwî kemudian mengemukakan sebuah contoh. Contoh yang ia hadirkan adalah terkait dengan kewajiban mengadakan musyawarah. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. As-Syura: 38 dan QS. Ali Imran: 159. Dua ayat tersebut, yang pertama merupakan Makkiyah sedangkan kedua adalah Madaniyah. Keduanya memiliki substansi yang sama yaitu wajibnya mengadakan musyawarah. Namun kedua ayat tersebut tidak menyinggung sama sekali tata cara musyawarah yang ideal yang harus dilakukan. Nash juga tidak menyinggung tentang mekanisme musyawarah, terlebih jika yang melakukannya antara pemerintah dengan masyarakat, terlebih saat keduanya memiliki perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dikompromikan dari berbagai sudut maupun sisi. Dengan demikian terbukti bahwa nash tidak membicarakan itu semua, sebab jika hal itu disebutkan tentu akan memberatkan dan mempersulit manusia.

c. Nash bersifat terbuka bagi setiap interpretasi

Implementasi faktor ketiga ini adalah tertuju pada nash-nash yang memuat hukum parsial (*juz'iyah*) dan yang terperinci. Nash yang memuat hukum parsial diformulasikan dan dinyatakan dengan bentuk kata ataupun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

redaksi yang memungkinkan terdapat di dalamnya keberagaman penafsiran. Satu kata bisa memiliki beberapa makna tergantung pihak yang memberi pemaknaan sesuai dengan karakter maupun tingkat integritas keilmuannya. Tidak heran jika faktor ketiga ini beserta dua faktor sebelumnya pada tahap berikutnya mendorong munculnya berbagai aliran pemikiran hukum dalam khazanah fiqh Islam.

Untuk menunjukkan keterbukaan al-Qur'ân dan hadis terhadap berbagai pemahaman, pemikiran dan penafsiran, akan dipaparkan dua contoh, satu di antaranya mewakili nash al-Qur'ân dan yang lain mewakili hadis. Contoh pertama adalah permasalahan *ila'* (الإيلاء). Dalam QS. al-Baqarah: 226-227 terdapat kata “يُؤْلُون” yang memiliki arti sumpah. Kata ini, jika diungkapkan dengan menggunakan kata “*ila'*,” maka dalam fiqh Islam memiliki arti *على ترك الوطء* artinya bersumpah tidak akan menggauli istri. Jika diteliti dengan seksama, ayat tersebut hanya menyatakan bahwa bagi para suami yang meng-*ila'* istrinya hendaknya memberikan batasan waktu hingga empat bulan, sedangkan ayat tersebut tidak memberikan uraian sama sekali tentang hal-hal yang bersifat teknis, misalnya kriteria suami yang boleh meng-*ila'* istri, dalam keadaan bagaimana suami boleh menjatuhkan *ila'*, apa hukum yang muncul jika istri yang disumpah *ila'* ternyata belum pernah digauli sama sekali dan lain sebagainya. Berawal dari redaksi ayat di atas yang bersifat global dan belum ada rincian sama sekali, maka berimplikasi pada keragaman interpretasi dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat di antara para ahli fiqih sejak masa para sahabat, tabi'in sampai generasi-generasi setelah mereka.

Contoh kedua adalah hadis yang membicarakan tentang tidak diperbolehkannya mempermainkan harga pasar. Dari sini akan diketahui sejauh mana hadis itu mampu menampung sejumlah pemahaman dan kreativitas para mujtahid. Pada masa Nabi Saw, suatu saat pernah terjadi lonjakan harga yang begitu tinggi, kemudian beberapa sahabat datang padanya dengan berkata: “Wahai Rasul, alangkah baiknya jika Anda menurunkan harga. Rasul kemudian menjawab, “Sesungguhnya Allah Maha Penggenggam, Pemerluas, Pemberi Rezki dan Penentu Harga dan aku berharap Allah Swt menurunkan ilham padaku dan janganlah seseorang menentukan dengan kegelapan yang akan menutupi dirinya sendiri dalam diri maupun hartanya.”<sup>143</sup> Pada riwayat lain menyebutkan bahwa telah datang seorang laki-laki pada Nabi Saw lalu berkata: “Wahai Rasul tentukanlah harga”, Rasul pun menjawab: “Berdoalah kepada Allah”. Kemudian datang lagi orang lain dan juga berkata: “Wahai Rasul tentukanlah harga”, Rasul kemudian menjawab: “Allah-lah yang menaikkan dan menurunkan harga.”<sup>144</sup>

Kandungan makna kedua hadis di atas memberikan pengertian bahwa syariat Islam menginginkan adanya kebebasan dalam perdagangan di pasar dan mempercayakan naik turunnya harga pada perkembangan pasar, sesuai

<sup>143</sup> Abu ‘Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Shaibani, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, (Bairut: ‘Alam al-Kutub, 1998), juz. 3, hal. 156.

<sup>144</sup> Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Ali ibn Musa al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 140.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hukum permintaan dan jumlah persediaan barang. Tidak hanya demikian, hadis tersebut juga menegaskan bahwa campur tangan dalam kebebasan pribadi, campur tangan dalam produktivitas perdagangan dan barang konsumsi merupakan perbuatan zalim yang harus dihindari. Berdasarkan kedua hadis itu pula para ahli hadis berkesimpulan bahwa penentuan harga hukumnya haram dan merupakan perbuatan zalim.

d. Fatwa berubah seiring dengan perubahan waktu, ruang, kondisi, dan adat.

Menurut al-Qaradhâwî, konsep perubahan fatwa seiring dengan perubahan waktu, ruang, kondisi dan tradisi masyarakat, diperbolehkan. Dengan konsep ini, fiqh Islam dapat mengakomodir perubahan masyarakat yang akan terus mengalami perkembangan. Al-Qaradhâwî menegaskan bahwa al-Qur'ân maupun hadis tidak lain kecuali memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan alam semesta, menegakkan keadilan, menghilangkan segala macam kezaliman dan segala macam kegiatan yang merusak kedamaian dan ketentraman dunia, sehingga para ahli fiqh dalam setiap merumuskan hukum dan memberikan fatwa harus selalu bertumpu pada situasi dan kondisi *mahkum 'alaih* dan bersandar pada tujuan-tujuan utama syariat (مقاصد الشريعة) dan tidak harus selalu berpegang teguh kepada satu pendapat dari salah satu ahli fiqh.

Al-Qaradhâwî, mengutip pernyataan Ibn Qayyim dan ulama lain, bahwa fatwa harus selalu berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan waktu, ruang, kondisi dan motivasi. Lebih lanjut Ibn Qayyim menjelaskan bahwa perubahan fatwa hanya bertujuan untuk merealisasikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan manusia, sebab syariat Islam berlandaskan kemaslahatan dan tidak menghendaki kesukaran dan kesulitan.

Berdasarkan realitas tersebut, al-Qaradhâwî mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah hukum-hukum yang sama sekali tidak berubah dari ketentuan tunggalnya sejak semula, yaitu tidak terpengaruh oleh perkembangan ruang, waktu dan ijtihad para ahli fiqih. Hukum semacam ini antara lain adalah hukum yang mengandung unsur kewajiban atau perintah, larangan dan ketetapan syariat serta menyangkut hukuman terhadap tindakan kriminal. Kedua adalah hukum yang menerima perubahan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang ada, selaras dengan perkembangan waktu, ruang dan kondisi. Misalnya adalah tentang ukuran, bentuk sanksi, cara pelaksanaan dan apapun hal-hal yang bersifat cabang, kecuali yang telah ditentukan. Dalam hal ini syariat terbuka terhadap perbedaan penafsiran, sehingga hukum yang dihasilkan bisa berubah dan disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan.

### **8. Argumentasi Historis Elastisitas Hukum Islam al-Qaradhâwî**

Berdasarkan deskripsi sejarah, tampak jelas bahwa hukum Islam sejak kemunculan hingga kapan pun bersifat elastis, bisa berubah dan tidak jumud, sehingga mampu berkembang dan bisa bersesuaian dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

- a. Pedoman dari Sunnah

Sejarah pertama, yang berasal dari sunah Nabi Saw adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah bahwa seseorang bertanya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Nabi Saw mengenai hukum bersentuhan (memeluk ketat) dengan isteri bagi orang yang berpuasa, kemudian Nabi Saw memberi keringanan padanya. Lalu datang orang lain bertanya (sama), kemudian Nabi Saw melarangnya. Ternyata, orang yang diberi keringan adalah orang tua dan orang yang dilarang Nabi Saw adalah pemuda.<sup>145</sup>

Hadis tersebut, meski diakui al-Qardhawi lemah, namun didukung oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab *Musnad*, dari sahabat ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn ‘Ash bahwa suatu ketika kami sedang bersama Nabi Saw, kemudian datang seorang pemuda lalu bertanya, “Wahai Rasul, bolehkah aku mencium istriku ketika aku puasa?”, Rasul menjawab: “Tidak”, kemudian datang seorang tua bertanya, “Wahai Rasul, bolehkah akau mencium istriku ketika aku puasa?” jawab Rasulullah: “Ya”. Kemudian kami saling memandang. Rasul kemudian bersabda: “Aku tahu kalian saling memandang, sesungguhnya orang tua yang telah cukup umur lebih bisa mengendalikan diri.”<sup>146</sup>

Masih banyak hadis yang memiliki subtansi senada dengan hadis di atas. Sebagai penutup dari contoh dari item ini adalah fakta bahwa Nabi Saw pernah menjawab satu persoalan dengan berbagai jawaban. Hal ini disebabkan karena keadaan penanya berbeda satu dengan yang lain. Dalam hal ini Nabi Saw memberikan jawaban dan jalan keluar yang relevan dan

<sup>145</sup> Hadis tersebut dinyatakan oleh al-Qaradhâwî sebagai hadis yang sanad-nya *dha’if* (lemah) dan tidak mungkin dijadikan sandaran untuk menetapkan hukum. Namun hadis tersebut dikuatkan dengan hadis lain sehingga derajatnya menjadi kuat, sehingga bisa dijadikan landasan hukum.

<sup>146</sup> Abu ‘Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Shaibani, *Op. Cit.*, juz. 3, hal. 439.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cocok, sesuai dengan kondisi masing-masing penanya. Salah satu contoh adalah ketika Nabi Saw ditanya tentang amal perbuatan yang paling mulia, maka jawaban Rasul berbeda-beda. Mula-mula Nabi Saw menjawab iman kepada Allah Swt dan rasul-Nya. Ketika ada pertanyaan lagi, jawaban Nabi Saw berganti dengan jihad *fi sabilillah*. Kemudian ada yang bertanya lagi, Nabi Saw menjawab dengan haji mabrur.<sup>147</sup>

b. Petunjuk dari Sahabat

Semua orang yang memperdalam ilmu sejarah, khususnya sejarah hukum Islam, maka dengan mudah menemukan kesimpulan bahwa sahabat Nabi Saw adalah orang-orang yang paling sering menggunakan kaidah perubahan fatwa karena adanya perubahan hal-hal yang menyebabkannya. Terdapat banyak contoh mengenai hal ini, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>148</sup>

1. Kasus peminum arak

Telah dipahami bahwa pada zaman Nabi Saw bentuk hukuman bagi peminum arak belum ditentukan dan digariskan secara kongkrit. Hukuman bagi peminum arak hanya sebatas *ta'zir*. Hal ini dapat dilihat pada hadis yang diriwayatkan Bukhari dari 'Utbah ibn al-Harith bahwa Nu'aiman atau Ibn Nu'aiman, seorang pemabuk, dibawa menghadap Nabi Saw. Namun Nabi Saw merasa berat untuk menjatuhkan hukuman padanya dan memerintahkan kepada mereka yang ada di rumah untuk

<sup>147</sup> Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 374.

<sup>148</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *'Awâmil al-Sâ'ah wa al-Murûnah*, *Op. Cit*, hal. 103-132.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memukulnya dengan ikatan rumput dan sandal. Aku sendiri termasuk orang yang memukulnya.<sup>149</sup>

Hadis senada diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berkata bahwa seorang laki-laki yang telah minum arak didatangkan pada Nabi Saw. Kemudian Nabi Saw bersabda “Pukullah dia”. Abu Hurairah berkata “Maka kami pun memukulnya, di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya, ada pula yang memukul dengan bajunya.”

Berdasarkan dua hadis di atas, dengan jelas menjelaskan bahwa hukuman bagi peminum arak adalah dipukul, meski Nabi Saw tidak memberikan penjelasan dengan kongkrit tentang teknik pemberian hukuman, apakah dengan menggunakan sandal, baju, seutas rumput, atau dengan menggunakan cambuk. Nabi Saw tidak memberi batasan tertentu tentang jumlah pukulan yang harus ditimpakan pada peminum arak. Hal ini berbeda sama sekali dengan kasus peminum arak melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Nasa’i dengan sanad yang kuat, dari sahabat Ibn ‘Abbas, yang berkata bahwa sesungguhnya Nabi Saw tidak memerintahkan memukul peminum arak sama sekali pada suatu kesempatan.<sup>150</sup>

Berdasarkan uraian hadis-hadis di atas, jika dipahami dengan sepintas dan tidak dipahami dari sudut pandang pencahangan hukum

<sup>149</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, *Op. Cit*, hal. 275.

<sup>150</sup> Sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dan Nasa’i dari sahabat Ibn ‘Abbas. Lihat Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Barri*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1409 H/ 1989), juz. 7, hal. 385.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*tasyri'*), maka akan menimbulkan kesan kontradiktif, pada hal kenyataannya tidak demikian adanya. Hadis-hadis tersebut merupakan realitas menarik dari segi elastisitas hukum Islam. Ketika Islam masih lemah, Nabi Saw tidak memberikan hukuman cambuk atas peminum arak. Namun ketika Islam sudah kuat, maka Nabi Saw menetapkan hukum tersebut, meskipun tidak menjelaskan batasan jumlah ataupun teknisnya.

## 2. Fatwa tentang Zakat Fitrah

Nabi Saw, dalam sebuah hadis *shahih*, mewajibkan atas semua umat Islam pada akhir bulan Ramadhan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'*<sup>151</sup> makanan dari kurma, anggur, gandum atau keju. Namun, *shahih* pula hadis yang menyatakan bahwa pada masa sahabat, banyak dari mereka mengeluarkan zakat fitrah hanya setengah *sha'* jagung. Hal ini dilakukan karena mereka berpendapat bahwa setengah *sha'* jagung nilai atau harganya sepadan dengan satu *sha'* kurma atau gandum basah. Lebih dari itu, al-Qaradhâwî mengutip keterangan yang disampaikan oleh Ibn Mundzir bahwa sahabat 'Utsman, 'Ali, Abu Hurairah, Jabir, Ibn 'Abbas, Ibn Zubair, Asma' binti Abu Bakar berpendapat bahwa zakat fitrah dapat dibayar dengan setengah *sha'* jagung.

## 3. Fatwa Umar ibn Khattab

<sup>151</sup> Satu *sha'* sama dengan 4 mud, sedangkan satu mud sama dengan 0,67979 Kg. Muhammad Ibn Isma'il al-Shan'ani, *Subul al- Salam*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1405 H/ 1985 M), hal. 345.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu contoh yang membuktikan bahwa perubahan hukum disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi adalah mengenai gagasan khalifah ‘Umar untuk menghentikan atau tidak memberikan lagi bagian zakat atas orang-orang yang pada masa Nabi Saw dan masa Khalifah Abu Bakar dikenal dengan sebutan *mu'allaf qulubuhum* atau orang-orang yang lemah hatinya. Menurut al-Qaradhâwî, yang dilakukan ‘Umar tersebut bukan semata-mata ingin menghapus (*nasakh*) ketentuan yang telah ditetapkan oleh al-Qur’ân dan hadis atau menganulir sunnah Nabi yang telah dilakukan Nabi Saw hingga wafat, namun hal itu dilakukan karena Umar melihat kenyataan bahwa Islam tidak lagi memiliki kebutuhan untuk merangkul orang-orang non-Muslim agar memeluk agama Islam dan menguatkan hati orang-orang yang baru masuk Islam karena pada saat itu Islam telah besar dan kuat. Tidak hanya itu, keputusan yang diambil ‘Umar tersebut bertujuan untuk mencegah semakin banyaknya orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai *mu'allaf qulubuhum*.

### 9. Metode Ijtihad Alternatif Perspektif al-Qaradhâwî

Yûsuf al-Qaradhâwî dalam membahas persoalan ini bertitik tolak dari anggapan bahwa ijtihad dalam bidang pemikiran termasuk dalam bidang fiqh adalah merupakan hasil kerja manusia, yang dapat diteliti, diuji, dibenarkan atau disalahkan, didiskusikan, diperdebatan karena hasil ijtihad tidak memiliki



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesucian.<sup>152</sup> Bahkan lebih jauh lagi dikatakan hasil ijtihad itu bukan agama, tetapi ia adalah pemahaman terhadap agama. Munculnya mazhab fiqih di zaman keemasan Islam, tidak lain merupakan perbedaan pemahaman terhadap nash-nash agama yang bersifat *zhanni*. Hal ini dengan sendirinya membuka kesempatan yang lebih luas bagi munculnya ijtihad yang mengarah kepada pembahasan kehendak Ilahi. Pada saat yang sama, muncul berbagai pandangan yang kemungkinan perbedaannya sangat luas. Karena begitu luasnya batas yang dikaji, sehingga menuntut sumbangan pemikiran yang sangat bervariasi. Karena itu dalam banyak hal, pakar-pakar Islam kontemporer, termasuk Yûsuf al-Qaradhâwî, mengajukan suatu pendekatan transformatif dalam memahami fiqih dan upaya mencari relevansinya dengan persoalan kekinian. Menurut sebagian ahli, kegagalan fuqaha' selama ini karena kurang memperhatikan kondisi masyarakat dalam perkembangan yang sedemikian rupa sehingga muncul kesengajangan antara fiqh secara teoritis dengan kenyataan masyarakat secara praktis. Ada dua bentuk ijtihad, yaitu ijtihad *intiqâ'i* dan ijtihad *insyâ'i*. Pertama, ijtihad *intiqâ'i* adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fiqih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagai mana tertulis dalam kitab fiqih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang.<sup>153</sup>

<sup>152</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî mengutip pendapat yang dilontarkan oleh para imam mujtahid, bahwa pendapatnya tidak mtlak harus diikuti oleh kaum muslimin, karena dalam memahami dalam ajaran agama perbedaan itu tidaklah sesuatu yang terlarang. Lihat Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fiqh al-Ikhtilaf*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1409 H/ 1989 M), hal. 57-58.

<sup>153</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *al-Ijtihâd al-Muâ'shir baina al-Inzhibâth wa al-Infirâth*, (Kairo: Dar Tauzi' wa al-Nashr al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994 M), hal. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijtihad *intiqâ'i* sebutan lainnya ijtihad *tarjîhi* (eklektik-selektif). Metode ini berbeda dengan sikap taklid, yakni berpegang kepada pendapat tertentu tanpa meneliti dalilnya. Maksud dari metode ini adalah mengadakan studi perbandingan terhadap berbagai pendapat dengan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang mendasari pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dengan berpatokan pada kaidah-kaidah tertentu yang antara lain adalah; kesesuaiannya dengan kehidupan zaman sekarang, lebih bersemangat kemanusiaan, lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam, lebih dekat kepada perwujudan *maqâshid al-syarî'ah*, kemashlahatan manusia, dan mencegah *mafsadât*. Secara teknis, ijtihad ini dapat dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompeten dengan tanpa adanya pengaruh politik dan tekanan dari manapun. Mereka harus independen, dan masyarakat boleh mengikuti dan mengamalkannya dari hasil-hasil ijtihad mereka.<sup>154</sup>

Seleksi pendapat-pendapat fiqih atau mazhab yang dilakukan dalam ijtihad *intiqâ'i* selama ini masih tersandung keyakinan sebagian kalangan bahwa *talfîq* adalah sesuatu yang diharamkan. Menurut al-Qaradhâwî, yang dimaksud *talfîq* adalah menambal sulam sebagian pendapat dengan sebagian pendapat yang lain tanpa didasari dalil, tetapi hanya semata-mata taklid belaka, mengikuti pendapat yang sesuai dengan subjektivitasnya, tidak mau mengikuti pendapat yang benar dan kuat. Berbeda dengan model ijtihad yang ditawarkan

---

<sup>154</sup> *Ibid*, hal. 21-22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, yaitu mengikuti pendapat yang benar-benar berdasarkan dalil yang ada, baik yang sesuai dengan mazhab yang bersangkutan atau tidak.<sup>155</sup>

Kemungkinan besar pendapat para ahli fiqh terdahulu mengenai masalah yang dipecahkan itu berbeda-beda. Dalam hal ini para ulama bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil yang mereka pergunakan, kemudian memberikan pendapatnya mengenai suatu permasalahan yang dianggapnya lebih kuat dan lebih dapat diterima. Mereka itu terdiri dari *ahli tarjih* dalam klasifikasi mujtahid yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqh pada umumnya. Dalam dalam melaksanakan *ijtihad intiqa'î* diperlukan analisis yang cermat dengan memperhatikan faktor sosial budaya, kemajuan IPTEK yang sesuai dengan perkembangan zaman. Diperlukan kajian terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh ahli fiqh terdahulu dan juga relevansinya di masa sekarang.<sup>156</sup>

Al-Qaradhâwî menyebutkan bahwa standarisasi alat pengukur *tarjih* ini paling tidak ada empat; (1) Pendapat itu lebih cocok dengan orang zaman sekarang, (2) Pendapat itu lebih banyak mencerminkan *rahmah* kepada manusia, (3) Pendapat itu lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh syara', (4) Pendapat itu lebih utama dalam merealisasikan maksud-maksud syara', mashlahat manusia, dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia.

Menurut Fathurrahman Jamil, mujtahid dalam tipe *ijtihad* ini hampir sama dengan *ahlu tarjih* dalam klasifikasi mujtahid yang dikemukakan oleh

<sup>155</sup> *Ibid*, hal. 117.

<sup>156</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *al-Ijtihâd fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah ma'a Nazharât Tahlîliyyah fî al-Ijtihâd al-Mu'âshir*, (Kairo: Dar Tauzi' wa al-Nashr al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994 M), hal. 152.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli Ushul Fiqih pada umumnya. Namun yang harus digarisbawahi adalah bahwa kegiatan *tarjih* yang dilakukan pada era kebangkitan kembali (termasuk saat ini) berbeda dengan kegiatan *tarjih* pada masa kemunduran. Pada masa itu, kegiatan *tarjih* hanya berkutat pada kegiatan menyeleksi pendapat para ahli fiqih di lingkungan mazhab tertentu, seperti Syafi'iyah, Malikiyah, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan *tarjih* pada masa sekarang ini bersifat lintas mazhab, tidak terbatas pada mazhab tertentu.<sup>157</sup>

Jelaslah bahwa metode *ijtihad* tersebut bisa diterapkan tidak saja pada lingkup mazhab empat, namun bisa juga keluar dari lingkup empat mazhab tersebut dan memilih pendapat-pendapat selainnya. Pendapat-pendapat tersebut bisa saja datang dari kalangan sahabat, *tabi'in*, maupun para ulama *salaf* yang hidup sesudah mereka. Dengan demikian, nilai kegiatan *ijtihad*nya terletak pada kesungguhan *mujtahid* untuk meneliti berbagai pendapat yang ada dengan melakukan pengkajian terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar berpikir masing-masing serta kesesuaiannya dengan kondisi kekinian dan kedisinian.

Menurut Yûsuf al-Qaradhâwî, ada beberapa instrumen kontemporer yang menjadi acuan dalam menyeleksi atau mencari pendapat terkuat dari khazanah fiqih Islam, yakni: (1) Perubahan sosial dan politik serta perkembangan dunia global. Bahwasanya zaman modern telah membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Perubahan-perubahan ini menuntut diadakannya peninjauan ulang terhadap pendapat lama yang tidak sesuai lagi dengan kondisi baru untuk memilih dan

<sup>157</sup> Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hal. 32.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeleksi pendapat-pendapat yang dulu dianggap lemah atau ditinggalkan.

(2) Pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya. Bahwasanya perkembangan pengetahuan sekarang ini, terutama dalam bidang ilmu-ilmu biologi dan fisika antara lain menjadi dasar bagi orang-orang yang hidup pada zaman modern atas pengetahuan-pengetahuan yang berkembang pada masa-masa sebelumnya.

Antara lain, perkembangan-perkembangan dalam ilmu alam, falak, kimia, fisika, kedokteran, patologi, anatomi dan lain-lain sebagainya menjadi dasar bagi umat Islam, khususnya ahli hukum Islam kontemporer untuk menguatkan atau melemahkan pendapat fuqaha' yang telah berkembang pada masa-masa sebelumnya. (3). Desakan-desakan zaman dan kebutuhannya. Adanya desakan zaman dan kebutuhannya mengharuskan seorang pakar hukum Islam masa kini untuk memperhatikan realita, kemudahan dan keringanan dalam hukum-hukum *furu'iyyah* dan bersifat praktis, dalam bidang ibadah maupun mu'amalah.

Dalam hal ini, seorang yang berijtihad untuk kepentingan umat Islam dituntut agar selalu memperhatikan kondisi darurat, halangan dan kondisi-kondisi pengecualian hukum.<sup>158</sup>

Contoh ijtihad *tarjih* ini adalah tentang harusnya meminta izin untuk menikahkan anak gadis. Golongan Syafi'i, Maliki, dan mayoritas golongan Hanbali berpendapat sesungguhnya orang tua berhak memaksakan anak gadisnya yang sudah *aqil baligh* untuk menikah dengan calon suami yang dipilih oleh orang tua walaupun tanpa persetujuan gadis tersebut. Alasan yang digunakan adalah orang tua lebih tahu tentang kemaslahatan anak gadisnya.

<sup>158</sup> Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihâd al-Muâ'shir baina al-Inzhibâth wa al-Infirâth*, Op. Cit, hal. 25-32.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara yang demikian itu mungkin masih dapat diterapkan pada seorang gadis yang belum mengenal sedikit pun tentang kondisi dan latar belakang suaminya. Sedangkan di zaman modern sekarang para gadis mempunyai kesempatan luas untuk belajar, bekerja dan berinteraksi dengan lawan jenis dalam kehidupan ini. Akhirnya, hasil dari ijihad *tarjih* ini adalah mengambil pendapat Abu Hanifah yakni melibatkan urusan pernikahan kepada calon mempelai wanita untuk mendapatkan persetujuan dan izinnnya.<sup>159</sup>

Contoh lain dari ijihad *intiqā'i* adalah tentang kekayaan yang dalam bahasa al-Qur'ân disebut dengan *al-amwal*, yakni segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk memilikinya. Menurut Ibnu Asyir, kekayaan pada mulanya adalah emas dan perak. Tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi sesuatu yang disimpan dan dimiliki. Menurut mazhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan menurut kebiasaan. Kekayaan dapat disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat tersebut, seperti tanah, binatang, barang-barang, perlengkapan dan uang. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan, tetapi mungkin dimiliki seperti ikan di laut, binatang di hutan dan burung di udara adalah termasuk kekayaan. Sebaliknya, sesuatu yang dapat dimanfaatkan tetapi tidak mungkin dimiliki seperti cahaya dan panas matahari, tidak termasuk kekayaan, begitu juga sesuatu yang secara nyata dapat dimiliki tetapi tidak dapat dimanfaatkan seperti sebutir beras, segenggam tanah, setetes air dan sebagainya. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, yang dimaksud dengan kekayaan adalah termasuk segala manfaat

<sup>159</sup> *Ibid*, hal. 121.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat dikuasai dengan cara menguasai tempat dan sumbernya. Ibnu Najim berpendapat bahwa kekayaan, sesuai dengan yang ditegaskan oleh ulama-ulama Ushul Fiqih adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan.

Setelah memperhatikan dan mempelajari berbagai pendapat tadi, maka al-Qaradhâwî menyimpulkan bahwa yang paling tepat adalah pendapat mazhab Hanafi. Alasannya adalah pengertian tersebut lebih dekat pengertiannya dalam kamus-kamus Arab dan dapat diterapkan pengertiannya melalui nash-nash tentang zakat.<sup>160</sup> Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kekayaan adalah sesuatu yang berwujud dan dapat dimiliki, itulah yang dapat dibebani kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Kedua, *ijtihad insya'i* (ijtihad kreatif-inovatif), yaitu usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fiqih terdahulu. Dalam hal ini, pendapat tersebut bisa saja menyangkut persoalan lama, namun pendapat yang dikemukakan menyangkut persoalan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dengan demikian, seorang *mujtahid* kontemporer memiliki pendapat baru menyangkut hal-hal yang telah memunculkan berbagai pendapat sebelumnya, sehingga pendapat yang dikemukakan tersebut berbeda dari pendapat-pendapat yang telah ada sebelumnya.<sup>161</sup>

<sup>160</sup> Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fiqh al-Zakâh*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1409 H/ 1989 M), hal. 123-124.

<sup>161</sup> Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihâd al-Muâ'shir baina al-Inzhibâth wa al-Infirâth*, *Op. Cit.*, hal. 32-33.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut al-Qaradhâwî, kegiatan *ijtihad insya'i* mutlak harus kembali diaktifkan guna mencari solusi-solusi baru terhadap permasalahan yang baru muncul serta demi pengembangan hukum Islam, sebab setiap masa memiliki problem yang berbeda, demikian pula halnya dengan masa sekarang, problemnya tidak serupa dengan masa dahulu. Kriterianya sangat keras dialamatkan kepada sebagian ulama yang menganggap bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Al-Qaradhâwî mengingatkan, munculnya dua bidang muamalah yang menuntut jawaban-jawaban baru khususnya ditinjau dari segi hukum dalam pelaksanaannya. Kedua bidang muamalah itu adalah: Pertama, bidang ekonomi atau keuangan. Dalam bidang ini muncul sederetan bentuk-bentuk transaksi yang sifatnya tidak pernah dijumpai pada masa dahulu seperti; asuransi dengan berbagai bentuk dan ragamnya, perbankan dengan segala macam bentuk transaksinya. Semua itu menunggu jawaban hukum secara pasti dan cepat. Kedua, bidang ilmu pengetahuan atau kedokteran. Dalam bidang ini juga ditemukan berbagai cara kegiatan yang memerlukan kejelasan hukum. Sebagai contoh dapat dikemukakan kasus pencangkakan jaringan atau organ tubuh manusia.<sup>162</sup>

Dalam ijtihad ini diperlakukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Jadi dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru diperlukan pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas. Tanpa mengetahui kasus yang baru tersebut, maka kemungkinan besar hasil ijtihadnya akan membawa kepada kekeliruan.

<sup>162</sup> *Ibid*, hal. 34-35. Lihat juga Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 172.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh dalam kasus pencangkokan jaringan atau organ tubuh manusia. Guna menetapkan hukumnya, maka perlu didengar lebih dahulu pendapat para ahli dalam bidang kedokteran, khususnya ahli bedah. Setelah diketahui secara jelas perihal pencangkokan tersebut kemudian baru dimulai dibahas dalam disiplin ilmu agama Islam, untuk kemudian diambil kesimpulannya.<sup>163</sup>

Dalam *ijtihad insya'i* ini diperlukan pemahaman tentang metode penetapan hukum. Di antara metode tersebut adalah *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan *sadd al-zari'ah*. Contoh yang dikemukakan beliau adalah tentang zakat tanah sewaan. Menurut beliau, penyewa hendaklah mengeluarkan zakat tanaman atau buah yang dihasilkan dari sebuah tanah sewaan bila telah sampai nisab dengan tidak menzakati hasil yang seharga ongkos sewa tanah yang akan diberikan kepada pemilik tanah, karena ongkos sewa tersebut dianggap sebagai hutang yang menjadi beban penyewa. Dengan demikian, ia hanya mengeluarkan zakat hasil yang bersih dari tanaman itu. Sedangkan pemilik tanah yang menyewakannya harus mengeluarkan zakat upah sewaan yang diterimanya apabila sampai senisab, dikurangi dengan pajak tanah yang harus dibayarkan. Jadi kedua-duanya mengeluarkan zakat hasil yang diterima masing-masing dari hasil tanah tersebut. Pendapat ini belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan dari hasil bumi yang disewa sepenuhnya dibebankan kepada pihak penyewa. Sedangkan menurut Abu

<sup>163</sup> Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihâd al-Muâ'shir baina al-Inzhibâth wa al-Infirâth*, Op. Cit, hal. 36.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanifah, kewajiban zakat sepenuhnya dibebankan kepada si pemilik tanah atau pihak yang menyewakan tanah.<sup>164</sup>

Contoh lain lagi tentang ijtihad *insya'i* seperti pendapat mufti Mesir, Syeikh Muhammad Bakhit al-Muth'i tentang kebolehan Fotografi. Beliau berpendapat bahwa berfoto itu boleh. Sebab alasan dilarangnya menggambar itu, adalah adanya upaya untuk membuat bandingan makhluk Allah Swt, sedangkan foto bukanlah merupakan bandingan makhluk Allah, tapi foto hanyalah bayangan makhluk itu sendiri yang merefleksi pada kertas. Hal ini sama halnya merefleksinya bayangan pada kaca, dan dengan ilmu modern manusia bisa menetapkan bahwa foto adalah bayangan yang merefleksi di dalam kertas melalui beberapa cara tertentu.

Menurut al-Qaradhâwî, pendapat ini sebagai hasil ijtihad *insya'i* yang benar, yang dikuatkan oleh suatu tradisi di Qatar bahwa mereka menamakan *tashwîr* (foto) dengan kata-kata “‘aks” (membuat bayangan) dan menamakan foto-foto dengan ‘*ukus*’ (beberapa bayangan hasil refleksi), dan tukang foto disebut ‘*akkas*’ (tukang refleksi bayangan). Kalau salah seorang mereka minta difoto, ia berkata ‘*ikisni*’ (buatlah bayangan saya). Kalau difoto, dinamai *al-‘aks*’ (membuat bayangan) dan tidak menamakannya dengan *tashwîr* (menggambar) tentunya tidak akan timbul keraguan dalam benak orang-orang yang ekstrim yang mengharamkan foto seperti di televisi. Sebab gambar yang kita saksikan di televisi adalah bayangan makhluk Allah, bukanlah gambar yang diserupakan dengan makhluk tersebut (untuk disembah), dan manfaatnya banyak, seperti untuk paspor, KTP, dan lain-lain.<sup>165</sup>

Ketiga, ijtihad *muqâran* (komparatif), yaitu menggabungkan kedua bentuk ijtihad di atas (*intiqâ'i* dan *insyâ'i*). Dengan demikian, di samping untuk menguatkan

<sup>164</sup> *Ibid*, hal. 37-38.

<sup>165</sup> *Ibid*, hal. 39.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mengkompromikan beberapa pendapat, juga diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntunan zaman.<sup>166</sup>

Di samping kedua bentuk ijtihad yang telah diuraikan, terdapat juga metode ijtihad yang mengintegrasikan antara keduanya. Penerapannya adalah dengan cara memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru. Contohnya adalah undang-undang *washiyat wajibah* yang diberlakukan di Mesir sejak beberapa tahun silam. Aturan dalam Undang-undang tersebut diambil dari pendapat ulama *salaf* yang mewajibkan wasiat dan juga dari pendapat Ibnu Hazm mengenai keharusan mengeluarkan sebagian dari harta pusaka sang mayit yang belum sempat berwasiat. Di samping dari kedua pendapat tersebut, dalam aturan-aturannya juga terdapat unsur dalam penentuan ukuran wasiat yang wajib dan menentukan orang-orang yang berhak menerima wasiat, yaitu anak laki-laki dari kelompok anak-anak laki-laki sampai ke bawah dan kelompok urutan pertama dari anak laki-laki dari anak-anak wanita. Jelaslah bahwa aturan tersebut merupakan hasil perpaduan atau integrasi antara ijtihad *intiqai* dan *insya'i*. Sedangkan bentuk-bentuk ijtihad kontemporer, menurut Yûsuf al-Qaradhâwî, ada tiga bentuk, yakni Perundang-undangan, fatwa serta hasil penelitian.<sup>167</sup>

Pada dasarnya, hasil ijtihad yang dihasilkan oleh ulama terdahulu merupakan karya agung yang masih utuh, bukanlah menjadi patokan mutlak, melainkan masih memerlukan ijtihad baru. Karena itu, diperlukan kemampuan mengutak-atik, mengkaji ulang hasil sebuah ijtihad tersebut, dengan jalan menggabungkan kedua bentuk ijtihad tersebut di atas.

#### D. Tinjauan Penelitian yang Relevan

<sup>166</sup> *Ibid*, hal. 52.

<sup>167</sup> *Ibid*, hal. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menghindari kesamaan objek penelitian, perlu kajian atau telaah pustaka.

Berdasarkan penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait judul penelitian ini, yaitu adalah sebagai berikut:

1. *Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqih (Studi atas Pemikiran M. Umer Chapra)*, oleh Abdul Qadir Jaelani, jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, tahun 2012. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa pengaruh bunga bank terhadap sosio-ekonomi di suatu masyarakat dan bahkan negara sangat signifikan. Keberhasilan dan keterpurukan akibat pinjaman dari bank yang dibarengi dengan bunga merupakan sesuatu yang spekulatif dan *gharar*. Bunga bank juga sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, sementara stabilitas ekonomi dalam sebuah negara tidak ada yang pasti, hal ini tergantung pada jumlah uang yang beredar, kemampuan daya beli masyarakat, kondisi perekonomian pada saat itu, GDP (*Gross Domestic Product*) yang dihasilkan oleh suatu Negara, sehingga akan mengakibatkan deflasi dan inflasi, yang kesemuanya masih bersifat spekulatif. Karena itulah, untuk menghindari ketidakpastian dan mengakibatkan kepada ketidakadilan-sebab yang pasti diuntungkan hanyalah pihak kreditur yang tidak memperdulikan kondisi debitur, maka pemikiran dari M. Umer Chapra sangat tepat dalam memahami persoalan bunga bank, hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah dan ushuliyyah yakni menolak kepada keterpurukan dan kezaliman. Sebab itulah, bank yang berbasis syariah merupakan solusi yang tepat untuk mengantisipasi perbankan konvensional.<sup>168</sup>
2. *Bunga Bank; Abdullah Saeed vs Yûsuf al-Qaradhâwî (Sebuah Dialektika Pemikiran Antara Kaum Modernis Dengan Neo-Revivalis)*, oleh Wartoyo, artikel dalam jurnal Ekonomi Islam, *Laraiba*. Dari analisa dan pembahasan mengenai

<sup>168</sup> Abdul Qadir Jaelani, "Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqih (Studi atas Pemikiran M. Umer Chapra)," jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, tahun 2012, hal. 82.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan dan pemikiran kedua tokoh tersebut, meskipun hampir sebagian besar memperlihatkan adanya pandangan yang kontradiktif, namun menurut penulis, pada dasarnya dari seluruh pandangan dan argumentasi-argumentasinya tersebut, masih ada beberapa persamaan persepsi dari keduanya. Di bawah ini akan disajikan antara persamaan dan perbedaan pandangan keduanya, adalah sisi persamaan pandangan: (1) Dalam membahas mengenai riba dan pemahaman mereka akan riba, keduanya sama-sama berangkat dari dasar pemahaman nash, baik itu dari nash-nash al-Qur'ân maupun sunnah. (2) Dalam melakukan interpretasi mengenai riba dalam nash-nash tersebut, keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu supaya interpretasi yang mereka hasilkan dapat memberikan sumbangsih bagi terciptanya kemaslahatan umat, sehingga umat tidak lagi berada dalam kebimbangan ketika menentukan suatu transaksi yang masih mengandung keraguan akan boleh dan tidaknya secara hukum. (3) Pada dasarnya keduanya memiliki pandangan, bahwa riba merupakan sesuatu yang mutlak dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Karena praktik riba hanya akan menciptakan suatu tatanan dalam masyarakat menjadi rusak, timbulnya ketidakadilan dan terjadinya penganiayaan oleh sekelompok orang terhadap sekelompok orang lainnya. Sedangkan dari sisi perbedaan pandangan: (1) Perbedaan pandangan dalam menentukan aspek apa sebenarnya yang terkandung dalam al-Qur'ân dan sunnah dalam pelarangan riba. Abdullah Saeed lebih cenderung memandang aspek penekanan moral, sedangkan Yûsuf al-Qaradhâwî lebih melihat dari aspek formalnya, atau apa yang ada dalam zahir ayat. (2) Perbedaan pandangan pada poin pertama di atas, menyebabkan terjadinya perbedaan pula dalam menentukan bagian pernyataan mana dalam al-Qur'ân yang sebenarnya harus dijadikan dasar pijakan utama dalam memahami pelarangan riba. Abdullah Saeed cenderung melihat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan *lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûn* sebagai titik tolaknya dalam memahami pelarangan ini, sementara Yûsuf al-Qaradhâwî lebih melihat pada pernyataan *fa lakum ru'ûsu amwâlikum* sebagai acuan utamanya.<sup>169</sup>

3. *Bunga Bank (Studi Perbandingan antara Pandangan Muhammad Abduh dan Murtadha Muttahhari)*, oleh Fuad Tsani, tesis Konsentrasi Ekonomi Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2009. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama, Muhammad Abduh maupun Murtadha Muttahhari sama-sama mengharamkan riba Muhammad Abduh dalam mensyaratkan pengharaman riba hanya berpegang pada unsur pelipat gandaan (*adh'afan mudha'afa*) yang menurutnya ada unsur penindasan (*zhulm*) dan eksploitasi di dalamnya. Sementara pada masalah bunga bank, Abduh cenderung menghalalkan bunga bank, dengan syarat bunga tersebut ditentukan dalam jumlah suku bangsa yang dibatasi suku bunganya dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh pemerintah, sedangkan Muttahhari berpendapat bahwa setiap riba adalah haram hukumnya, apapun macam dan bentuknya termasuk juga bunga bank. Bunga bank itu sama dengan riba, dan tabungan ataupun deposito itu mencerminkan praktik kerjasama dalam dosa, karena nasabah tahu benar bahwa uangnya akan dipinjamkan secara berbunga oleh bank kepada orang lain. Kedua, perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut lebih didominasi oleh perbedaan metode ijtihad dalam melihat persoalan bunga bank. Di mana Muttahhari lebih cenderung untuk melihat tekstualitas ayat tentang riba dan bersikap hati-hati. Sedangkan

<sup>169</sup> Wartoyo, "Bunga Bank; Abdullah Saeed Vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran Antara Kaum Modernis Dengan Neo-Revivalis)," jurnal Ekonomi Islam, *Laraiba*, vol. IV, No. 1, Juli 2010, hal. 130-131.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abduh lebih menonjolkan kemampuan ijtihad beliau dengan jalan mengaplikasikan metode kemaslahatan yang berlaku umum dan kesesuaian ayat al-Qur'ân dengan ayat lainnya (*munasabah*), dan juga Abduh lebih berpegang pada dogma “*al-Islam shalih likulli zaman wa makan.*”<sup>170</sup>

Itulah beberapa judul penelitian yang terkait dengan bunga bank. Adapun distingsi (perbedaan) judul yang akan saya teliti dengan judul-judul di atas adalah dari segi tokohnya. Penelitian yang sudah ada terkait dengan pemikiran al-Qaradhâwî di atas hanya sekedar membandingkan kesimpulan akhir mengenai status hukum bunga bank konvensional, tanpa dipaparkannya argumentasi dan filosofis secara mendalam. Oleh sebab itu, penelitian yang ingin penulis lakukan adalah mentelaah pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî mengenai status hukum bunga bank konvensional secara mendalam beserta argumentasinya, baik dari sisi analisa terhadap dalil, maupun dari sisi filosofisnya, tanpa mengkomparasikan dengan pendapat cendikiawan lain.

<sup>170</sup> Fuad Tsani, “Bunga Bank (Studi Perbandingan antara Pandangan Muhammad Abduh dan Murtadha Muttahhari),” tesis Konsentrasi Ekonomi Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2009, hal. 201.